

**PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP PENGARUH
MONEY POLITIK PADA PEMILIHAN LEGISLATIF 2019
DI KABUPATEN BIREUEN
(Studi Kasus : Gampong Pulo Naleung)**

SKRIPSI

Oleh :

**NAWAL AZKA
NIM. 170801074**

Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
Program Studi Ilmu Politik



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM-BANDA ACEH
2021/1442 H**

**“PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP PENGARUH MONEY
POLITIK PADA PEMILIHAN LEGISLATIF 2019
DI KABUPATEN BIREUEN“**

(Studi Kasus : Gampong Pulo Naleung)

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Pemerintahan
UIN Ar-Raniry Banda Aceh Sebagai Salah Satu Persyaratan Penulisan Skripsi Pada
Program Studi Ilmu Politik

Oleh :

NAWAL AZKA


NIM. 170801074

Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
Program Studi Ilmu Politik

Disetujui untuk diuji/dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I

Pembimbing II


Eka Januar, S.IP., M.soc.Sc.
NIP. 198401012015031003


Ramzi Murziqin, MA.
NIP. 198605132019031006

**PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP PENGARUH MONEY POLITIK
PADA PEMILIHAN LEGISLATIF 2019 DI KABUPATEN BIREUEN
(STUDI KASUS : GAMPONG PULO NALEUNG)**

SKRIPSI


Telah Diuji Oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar- Raniry
Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima Sebagai Salah Satu Beban Studi Program
Sarjana (S-1) Dalam Ilmu Politik

Pada Hari/ Tanggal :


kamis, 05 Agustus 2021 M
26 Dzulhijah 1442 H

Darussalam- Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi


Ketua,


Eka Januar, S.P., M.soc.Sc.
NIP. 198401012015031003

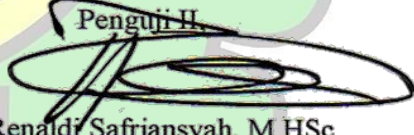
Sekretaris,


Ramzi Murziqin, S.H.I.M.A.
NIP. 198605132019031006

Penguji I,


Drs. Muslim Zainuddin, M.Si
NIP. 196610231994021001

Penguji II,


Renaldi Safriansyah, M.HSc
NIDN. 2007017903

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar- Raniry
Darussalam – Banda Aceh


Dr. Ernita Dewi S.Ag.,M.Hum
NIP. 197809172009121006

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nawal Azka

NIM : 170801074

Prodi : Ilmu Politik

Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan

Judul Skripsi : Persepsi Masyarakat Terhadap Pengaruh Money Politik Pada Pemilih Legislatif 2019 Di Kabupaten Bireuen (Studi Kasus Gampong Pulo Naleung).

Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Skripsi ini adalah benar-benar pekerjaan saya sendiri, bukan hasil dari jiplakan atau plagiat.
2. Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan Skripsi ini hasil jiplakan (plagiat) maka saya akan menanggung resiko yang diperkarakan berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry.

Banda Aceh, 2 Agustus 2021
Yang menerangkan,



Nawal Azka

ABSTRAK

Nama : Nawal Azka
Nim : 170801074
Fakultas/Jurusan : Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan / Ilmu Politik
Judul : Persepsi Masyarakat Terhadap Pengaruh Money Politik Politik Pemilihan Legislatif 2019 Di Kabupaten Bireuen (Studi Kasus) Gampong Pulo Naleung)
Tanggal Sidang : 05 Agustus 2021
Tebal Skripsi :
Pembimbing I : Eka Januar, S.IP., M.soc,Sc.
Pembimbing II : Ramzi Murziqin, MA.

Pemilihan umum dewan perwakilan rakyat bukan dipandang lagi sebagai peristiwa politik yang baru bagi masyarakat, karena telah menjadi tradisi turun temurun untuk menentukan wakil rakyat. Maka dari itu diselenggarakannya pemilihan umum, kegiatan kampanye merupakan hal mutlak menjadi bagian terpenting karena merupakan salah satu prosedur yang harus dilalui untuk bisa diadakannya sebuah pemilu. Banyak cara yang dilakukan oleh para calon legislatif salah satunya kampanye ke jalan-jalan, memasang poster, spanduk, dll dengan tujuan agar masyarakat dapat mengenalnya. Namun hal yang paling parah dan juga disebutkan sebagai senjata paling ampuh adalah dengan memengaruhi masyarakat dengan uang.

Penelitian ini bertujuan untuk mengukur persepsi masyarakat terhadap pengaruh *money politic* pada pemilihan legislatif di Kota Bireuen tahun 2019. Dalam penelitian ini teknis analisis yang digunakan adalah Metode Kuantitatif. Sampel pada penelitian ini berjumlah 93 responden dan dianalisis menggunakan analisis regresi linier sederhana.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa *Money Politic* memiliki pengaruh positif terhadap pemilihan legislatif hal ini juga berarti apabila *Money Politic* meningkat sebesar 1 maka kecenderungan masyarakat untuk memilih di pemilihan legislatif akan meningkat sebesar 1,082 kali. Nilai t hitung juga menunjukkan t hitung > t tabel yaitu $16,329 > 1,986$ hal ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan dari variabel *Money Politic* terhadap variabel pemilihan legislatif 2019 di Kabuapten Bireuen.

Kata Kunci: *Pemilu, Legislatif, Money, Politik*

A R - R A N I R Y

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji dan syukur hanya tercurah kepada Allah SWT. yang telah menganugerahkan rahmat dan hidayahnya-Nya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan sebaik-baiknya. Selawat beserta salam penulis sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. yang telah membawa umat manusia dari alam kebodaohan ke alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan.

Skripsi ini ditulis guna mendapatkan gelar sarjana ilmu politik (S.IP) pada program sarjana di Universitas Islam Negeri Ar-Raniry. Skripsi **“Persepsi Masyarakat Terhadap Pengaruh Money Politik Pada Pemilihan Legislatif 2019 Di Kabupaten Bireuen (Studi Kasus Gampong Pulo Naleung).”** ini dapat diselesaikan dengan bimbingan, arahan serta dorongan dari berbagai pihak.

Dalam kesempatan ini penulis tidak lupa mengucapkan terima kasih kepada :

1. Terima Kasih kepada Allah SWT. Dan kepada Nabi Besar Muhammad SAW.
2. Ayahanda dan Ibunda serta Adik-Adik saya tercinta beserta seluruh keluarga yang telah banyak sekali memberikan dukungan baik moril maupun materil.
3. Bapak Prof. Dr. H. Warul Walidin, AK, MA. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, beserta jajarannya.
4. Ibu Dr. Ernita Dewi, S.Ag., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan, beserta jajarannya.
5. Bapak Dr. H. Abdullah Sani, Lc, M.A. selaku Ketua Program Studi Ilmu Politik FISIP Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, beserta jajarannya.

6. Bapak Eka Januar, S.IP., M.soc,Sc. selaku Pembimbing I Skripsi pada Program Studi Ilmu Politik yang senantiasa sabar dalam membimbing dan mengarahkan hingga terselesaikan konsep tugas akhir ini.
 7. Bapak Ramzi Murziqin, MA. selaku Pembimbing II Skripsi pada Program Studi Ilmu Politik yang senantiasa sabar dalam membimbing dan mengarahkan hingga terselesaikan konsep tugas akhir ini.
 8. Seluruh Staff Pengajar FISIP Khususnya Program Studi Ilmu Politik yang telah membantu dan memfasilitasi dalam menyelesaikan Skripsi penulis.
 9. Kepada Raini Hasna yang senantiasa memberikan semangat serta menjadi partner dalam menyelesaikan Skripsi penulis
 10. Kepada Seluruh teman-teman seangkatan dan sekaligus sahabat-sahabat yang senantiasa memberikan semangat dikala kegelisahan, kegundahan dan kejenuhan menghampiri.
 11. Dan Seluruh Teman-teman Se-Organisasi yang telah memotivasi penulis, dengan begitu skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik
- Akhirnya, penulis memohon kepada Allah SWT. Semoga apa yang telah penulis dapatkan dari semua pihak menjadi amal ibadah dan mendapat pahala setimpal dari Yang Maha Kuasa.

Banda Aceh, 2 Agustus 2021
Penulis,


Nawal Azka

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
LEMBAR PERSETUJUAN PENELITIAN.	ii
LEMBAR PENGESAHAN SIDANG.	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR.	vi
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL.	xi
DAFTAR GAMBAR.	xii
DAFTAR DIAGRAM	xiii
DAFTAR GRAFIK	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan masalah.....	6
1.3 Tujuan Penelitian.....	7
1.4 Manfaat Penelitian.....	7
1.5 Penelitian Terdahulu	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Landasan Teori	10
2.1.1 Definisi Persepsi	10
2.1.1.1 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pengembangan .. Persepsi ... R. A. N. I. R. Y.	13
2.1.2 <i>Money Politic</i> / Politik Uang	14
2.1.2.1 Persepsi Masyarakat Terhadap Pengaruh <i>Money</i>	
<i>Politic</i>	16
2.1.2.2 Bentuk Bentuk <i>Money Politic</i>	17
2.1.2.3 Faktor Terjadinya <i>Money Politic</i>	19
2.1.2.4 <i>Money Politic</i> pada Pemilihan Legislatif	20

2.3	Landasan Hukum Tentang Pemilu.....	21
2.3.1	Dasar-Dasar yang Mengatur Larangan <i>Money Politic</i>	22
2.4	Karangka Pemikiran.....	23
2.5	Hipotesis.....	25

BAB III METODE PENELITIAN

3.1	Jenis Penelitian.....	26
3.2	Definisi Operasional Variable.....	26
3.2.1	Definisi Variable.....	26
3.3	Fokus Penelitian.....	28
3.4	Lokasi Penelitian.....	28
3.5	Populasi dan Sampel.....	28
3.5.1	Populasi.....	28
3.5.2	Sampel.....	29
3.6	Teknik Pengumpulan Data.....	32
3.7	Skala Pengukuran.....	33
3.8	Pengujian Instrumen Penelitian.....	33
3.8.1	Uji Validitas.....	33
3.8.2	Uji Realibilitas.....	34
3.8.3	Uji Normalitas.....	35
2.8.4	Uji Linearitas.....	36
3.9	Rancangan Analisis.....	36

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1	Gambaran Umum.....	38
4.1.1	Deskripsi Lokasi Penelitian.....	38
4.1.2	Asal-Usul Gampong Pulo Naleung.....	41
4.1.3	Letak Geografis Gampong Pulo Naleung.....	42
4.1.4	Kondisi Fisik Dasar Gampong Pulo Naleung.....	43
4.1.5	Kondisi Demokrafis Gampong Pulo Naleung.....	43

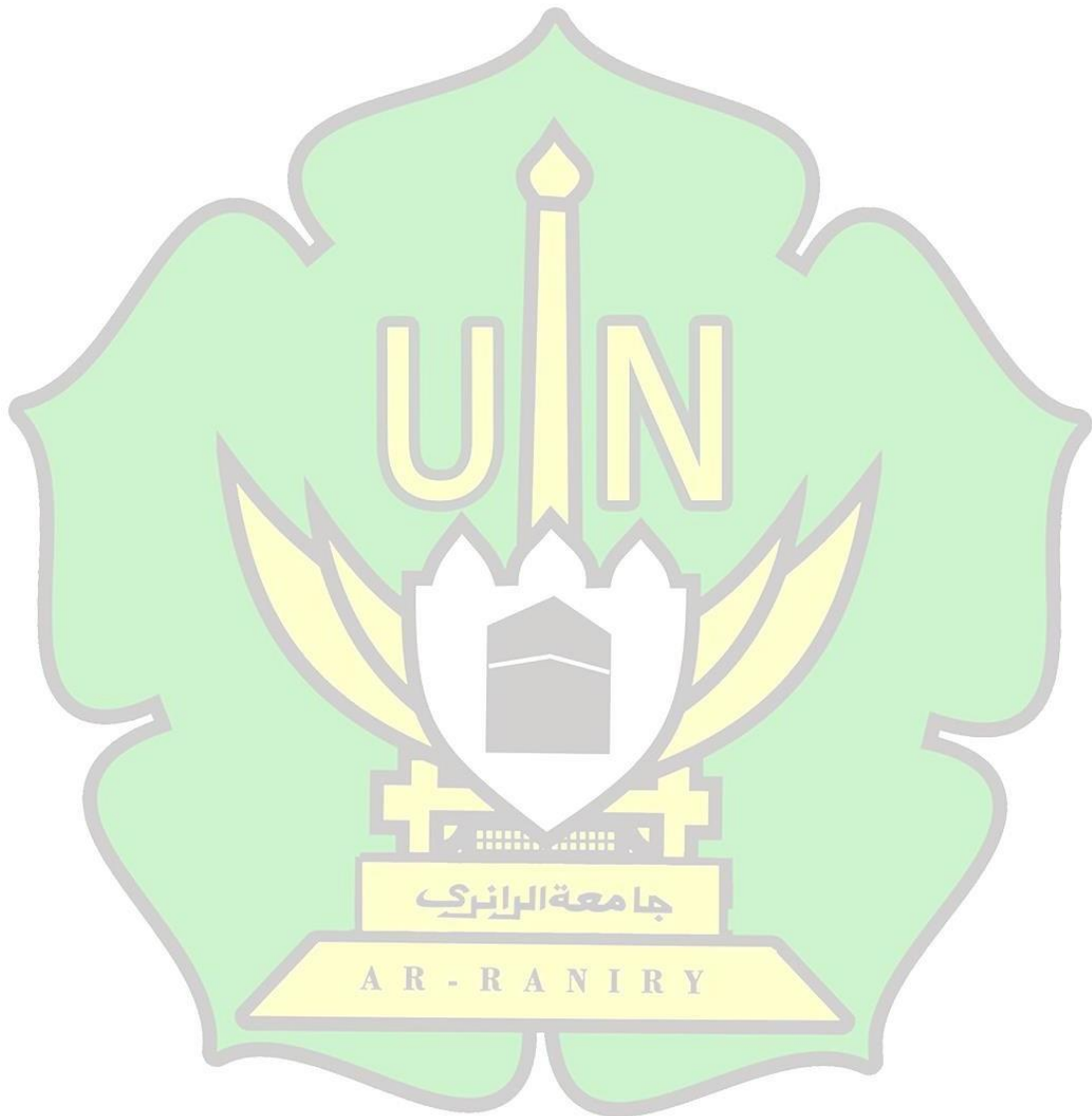
4.1.6 Kondisi Sosial Ekonomi Gampong Pulo Naleung	43
4.2 Hasil Penelitian.....	44
4.2.1 Karakteristik Responden	44
4.2.1.1 Responden Berdasarkan Umur	45
4.2.1.2 Responden Berdasarkan Jenis Kelamin	46
4.2.1.3 Responden Berdasarkan Status Perkawinan	47
4.2.1.4 Responden Berdasarkan Pendidikan	48
4.2.1.5 Responden Berdasarkan Pekerjaan.....	49
4.2.2 Analisis Partisipasi Politik pada pemilihan legislatif.....	51
4.2.3 Analisis Persepsi <i>Money Politic</i>	52
4.3 Hasil Pengujian Instrumen	54
4.3.1 Uji Validitas	54
4.3.2 Uji Reliabilitas	55
4.4 Hasil Uji Normalitas	57
4.5 Hasil Uji Linieritas	58
4.6 Hasil Analisis Regresi Linier Sederhana	59
4.7 Pembahasan	61
BAB V PENUTUP	
5.1 Kesimpulan.....	64
5.2 Saran	65
DAFTAR PUSTAKA.....	67

DAFTAR TABEL

1. Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu yang Relevan	8
2. Tabel 3.1 Operasional Variabel dan Indikator	27
3. Tabel 3.2 Jumlah sampel penentuan informan	30
4. Tabel 3.3 Jumlah sampel penelitian	31
5. Tabel 3.4 Skala Likert	33
6. Tabel 4.1 Identitas Responden Berdasarkan Umur	45
7. Tabel 4.2 Identitas Responden Berdasarkan Jenis Kelamin	46
8. Tabel 4.3 Identitas Responden Berdasarkan Status Perkawinan	47
9. Tabel 4.4 Identitas Responden Berdasarkan Pendidikan	48
10. Tabel 4.5 Identitas Responden Berdasarkan Pekerjaan.....	49
11. Tabel 4.6 Distribusi Responden terhadap Pemilihan Legislatif Tahun 2019	51
12. Tabel 4.7 Persepsi Responden terhadap Money <i>Politic</i> Pemilihan Legislatif	53
Tahun 2019.....	53
13. Tabel 4.13 Hasil Uji Validitas	55
14. Tabel 4.14 Hasil Uji Reliabilitas.....	56
15. Tabel 4.15 One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test	57
16. Tabel 4.16 Hasil Uji Linieritas.....	58
17. Tabel 4.17 Hasil Simultan Tahun 2019 (ANOVA).....	58
18. Tabel 4.18 Hasil Analisis Regresi Linier Sederhana.....	60

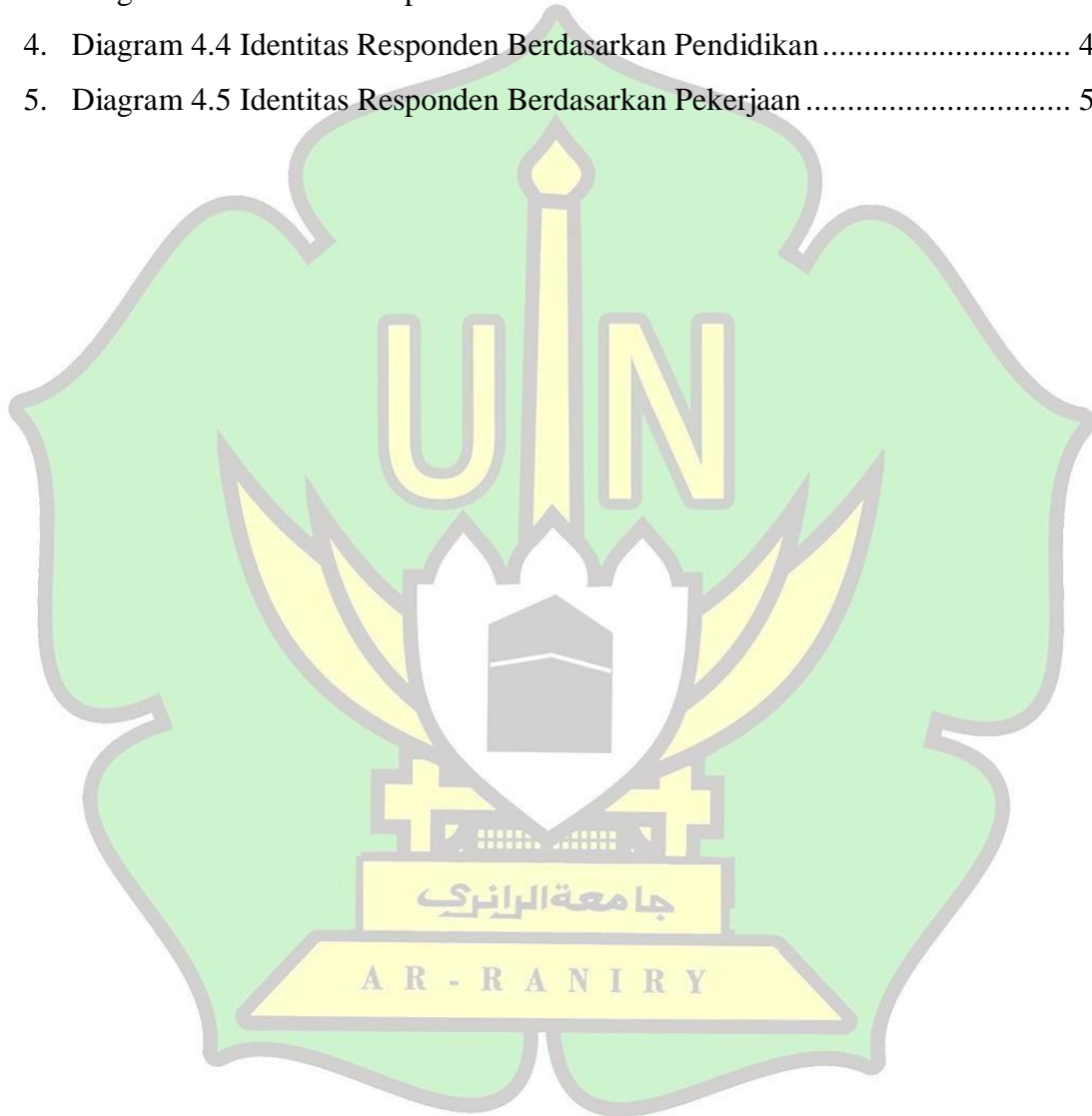
DAFTAR GAMBAR

1. Gambar 3.1 Karangka Pemikiran 23
2. Gambar 4.1 Peta Bireuen Dengan Pembagian Daerah Pemilihan..... 38



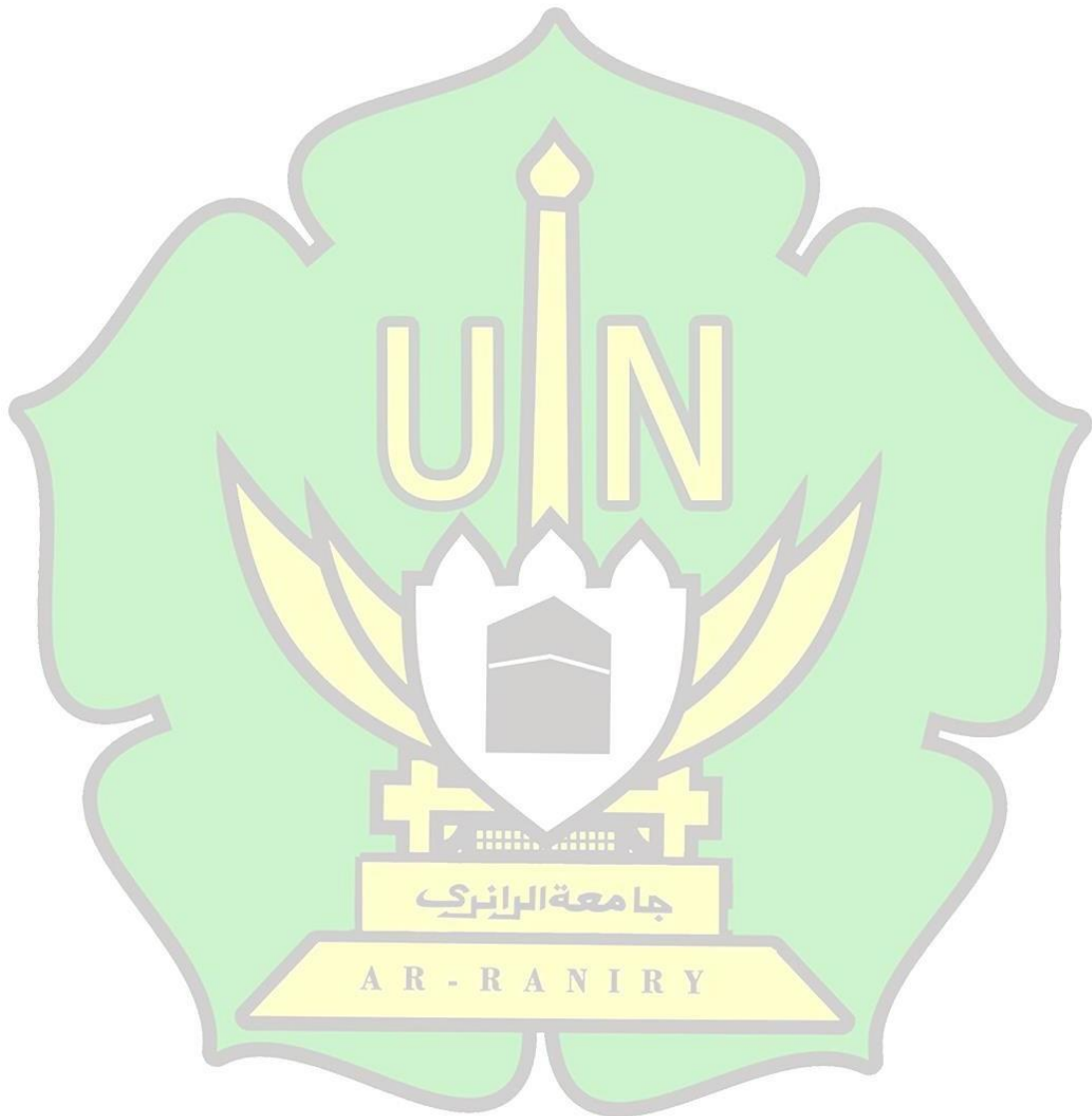
DAFTAR DIAGRAM

1. Diagram 4.1 Identitas Responden Berdasarkan Umur 45
2. Diagram 4.2 Identitas Responden Berdasarkan Jenis Kelamin 46
3. Diagram 4.3 Identitas Responden Berdasarkan Status Perkawinan..... 47
4. Diagram 4.4 Identitas Responden Berdasarkan Pendidikan..... 49
5. Diagram 4.5 Identitas Responden Berdasarkan Pekerjaan 50



DAFTAR GRAFIK

1. Grafik 4.1 Hasil Uji Normalitas 2019 (P-Plot) 57



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemilihan umum (Pemilu) dewan perwakilan rakyat bukan dipandang lagi sebagai peristiwa politik yang asing bagi masyarakat, sebab pemilihan umum legislatif sudah berlangsung sejak 2004 bahkan telah menjadi tradisi turun temurun sebagai sarana untuk menentukan wakil rakyat. Pemilihan dewan perwakilan rakyat atau disingkat dengan DPR sebagai sarana untuk menampung aspirasi politik rakyat untuk menentukan wakilnya yang diharapkan memenuhi keinginan dan harapan masyarakat. Dalam Undang-undang Nomor 3 tahun 1999 berkaitan dengan pemilu telah di muat pada pasal 1 butir (1 dan 2), dengan bunyinya sebagai berikut :

Pemilu sebagai sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945. diselenggarakan secara demokratis dan transparan, jujur dan adil, dengan memberikan hak pilih secara langsung, umum , bebas, dan rahasia.¹

Pemilu merupakan serangkaian kegiatan yang terdapat dalam dua aspek besar di dalamnya yang telah ditetapkan pada peraturan perundang-undangan. yaitu, Pemilih menunjukkan preferensi politiknya, dan suara dari pemilih dapat dikatakan sebagai sebuah kursi pada jabatan politik atau kekuasaan lainnya.²

¹ Pasal 1 butir (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999 Tentang Pemilihan Umum

² Agus Riwanto, Hukum Partai Politik dan Hukum Pemilu di Indonesia, Yogyakarta: Thafa Media, 2016, hlm. 53.

Pemilihan secara langsung merupakan hak dasar setiap individu maupun warga negara yang memang telah dijamin kebutuhannya oleh negara, pemilihan secara langsung merupakan sebuah sistem pemilu yang memberikan kesempatan kepada masyarakat agar dapat memilih. Pemilihan umum juga merupakan alat praktis politik untuk tercapainya sebuah pemerintahan perwakilan.³

Berkaitan diselenggarakannya pemilihan umum, hal yang terpenting dari pada pemilu adalah kegiatan kampanye, ini disebabkan perihal untuk melaksanakan sebuah pemilu perlu adanya kegiatan kampanye karena kegiatan tersebut merupakan prosedur penting untuk dilaksanakannya sebuah pemilihan. Kegiatan ini dilaksanakan untuk menyampaikan profil dan prospek kerja calon peserta pemilu. Bisa dikatakan bahwa kegiatan ini untuk mempromosikan figure maupun karisma dan juga visi dan misi serta sekaligus menyampaikan janji-janji politisnya, dengan begitu setiap calon lebih mudah untuk mempengaruhi masyarakat untuk memberikan hak pilihnya kepada calon tersebut. Namun berkaitan dengan hal tersebut, kegiatan ini juga bentuk dari komunikasi politik sebagai harapan memberikan hasil yang semaksimal mungkin dengan masa kegiatan yang memiliki jangka batas waktu tersebut.⁴

Untuk memenangkan kompetisi pemilu dan mendapatkan hasil suara yang banyak pada saat pemilihan, maka dari pada itu setiap calon harus mencari dukungan dengan sebanyak-banyaknya pada saat kegiatan kampanye agar dapat memenangkan kompetisi pemilu. Dengan demikian, maka banyak dari setiap calon tersebut melakukan kegiatan

³ Handayani, T.I (2014). Tinjauan Yuridis Kampanye Pemilihan Umum Kepala Daerah Dalam Penggunaan Media Televisi sebagai Media Kampanye. Universitas Hasanuddin.

⁴ Roger,S.(2010), Representasi kepentingan rakyat pada pemilihan legislatif 2011, Salatiga: Pustaka Pelajar.

kampanye dengan berbagai cara, ada yang melakukan kampanye ke jalan-jalan, memasang poster-poster, spanduk, flayer, pemplet, dll dengan tujuan agar masyarakat dapat mengenalnya. Namun hal yang paling parah dan juga disebutkan sebagai senjata paling ampuh adalah dengan memengaruhi masyarakat dengan kuasa uang.

Dalam pemahaman publik, *money politic* adalah pemberian uang secara langsung oleh para calon legislatif maupun tim sukses baik itu uang milik pribadi maupun milik partai. *Money politic* adalah suatu praktik kotor yang bisa dikatakan dapat merusak sistem demokrasi melalui pemilihan umum, Dan pastinya mengkhianati prinsip demokrasi selaku konsep negara yang menjadi konsep dasar pemilihan umum. Praktik kotor ini adalah pelanggaran yang biadap pada pelaksanaan pemilihan secara langsung. Dengan demikian ini menyebabkan dasar demokrasi menjadi cacat. Namun cukup banyak masyarakat yang rasional dengan tetap menerima sejumlah uang dari calon legislatif namun pada saat pemilihan berlangsung masyarakat tidak memilihnya dan sejak awal hanya memanfaatkan calon tersebut. Hal ini disebabkan karena tidak sedikit masyarakat yang menganggap bahwa hak pilih itu sangat berharga dan bukan hanya sekedar sebagai suatu transaksi. Seharusnya praktik *money politic* harus dihilangkan, karena disebabkan dasar dari pada pemilihan umum ini dilaksanakan untuk melahirkan pemimpin yang memang memiliki cukup kompetensi, cerdas dan memiliki rasa kepedulian yang tinggi terhadap permasalahan dalam masyarakat.⁵ Jika kita melihat kontestasi perpolitikan yang ada di Provinsi Aceh, praktik politik uang sudah menjadi salah satu kebiasaan yang

⁵ Indah Sri Utami, Pencegahan Politik Uang dan Penyelenggaraan Pilkada yang Berkualitas: Sebuah Revitalisasi Ideologi, Seminar Nasional Hukum, Vol. 2 No. 1 2016, hlm. 452.

dianggap sebagai “rahasia umum” dan lumrah untuk dilakukan oleh para elit politik ketika ingin meraih simpati, dukungan, serta suara terbanyak sehingga para elit politik dapat menang dalam Pemilu.⁶

Di Kabupaten Bireuen *money politic* telah menjadi pandangan masyarakat dari berbagai Kabupaten/Kota lain di Aceh. Apalagi selesai Pilkada 2017 Bireuen menikmati slogan baru yaitu kota ‘seratus ribu’. Ini adalah hal memalukan dalam sejarah kontestasi di Kabupaten Bireuen, ini membuat seakan akan politik di Kabupaten Bireuen beralih pada politik kuasa uang. Maka dari itu masyarakat telah menganggap hal lumrah terkait pemberian uang pada saat tahun demokrasi terjadi. Makanya tidak heran pada saat pemilihan legislatif 2019 terjadi, calon kandidat juga melakukan hal yang sama. Namun jika kita melihat pemilu di tahun 2014 *money politic* juga terjadi namun pastinya nominal uang yang dikeluarkan oleh calon legislatif itu berbeda. Yang tadinya pemilu 2014 masyarakat yang dapat memilih mendapatkan uang kira-kira sebesar seratus ribu, pada tahun 2019 menjadi sekitaran tiga ratus lima puluh ribu rupiah, jadi nominalnya telah berubah. Ini artinya untuk menjadi seorang anggota legislatif harusnya memiliki modal yang sangat besar. Ini artinya bisa juga dikatakan bahwa politik kita adalah politik padat modal, dan politik padat modal bisa disamakan dengan sistem demokrasi amplop. *Money politic* memang membuat masyarakat memiliki persepsi lain dalam hal memilih, apalagi pengaruh *money politic* membuat masyarakat mudah terpengaruh dalam memilih calon legislatif. Memang tidak semua yang mengambil uangnya akan tetap memilih yang

⁶ <https://aceh.tribunnews.com/amp/2019/04/02/politik-uang-jelang-pemilu-bagaimana-menangkapnya>. Diakses pada tanggal 21 Agustus 2020 pada pukul 22.00 WIB

memberikan uang, tapi walaupun demikian ini juga tetap saja merusak system demokrasi kita, karna UU kita telah diatur tentang pelaku *money politic*, tepatnya pada pasal 187 huruf a ayat satu dan dua, pemberi maupun penerima *money politic* akan sama-sama mendapatkan sanksi, berupa pidana kurungan penjara minimal 36 bulan dan maksimal 72 bulan. Kemudian dari pada itu juga pidana denda paling sedikit Rp 200 juta dan maksimal Rp 1 miliar.

Pada pemilu 2019, di Kabupaten Bireuen terdapat sebanyak 302.077 pemilih, dan Terdapat 524 anggota Calon legislatif bersaing guna memperebutkan 40 Kursi Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Bireuen dalam mewakili 6 dapil tersebut. dengan demikian tidak mengherankan jika kos politik pada pemilu semakin mahal. Jadi strategi yang paling mumpuni adalah strategi *money politic*, semakin banyak lawan semakin banyak yang harus dikeluarkan oleh calon kandidat. Namun yang menjadi menarik untuk diteliti yaitu pada dapil II tepatnya di Gampong Pulo Naleung. alasanya peneliti menilai Gampong Pulo Naleung berada di wilayah pesisir, Namun diluar dari pada itu, Pada pemilu 2019, Gampong Pulo Naleung menjadi sasaran *Money Politic* oleh salah satu timses partai nasional, serangan *money politic* pun dilakukan secara terang terangan, dibuktikan dari salah satu timses yang ketahuan sedang membagikan sejumlah uang kepada masyarakat. Meskipun demikian, Gampong Pulo Naleung telah menunjukkan bahwa telah terjadi serangan *money politic* di gampong tersebut, Dan pada tahun 2019 terdapat 928 Pemilih di Gampong Pulo Naleung. Berlatar belakang petani, gampong tersebut menjadi sasaran paling ampuh bagi para timses maupun calon kandidat untuk mendapatkan suara dari gampong tersebut, karena dalam pemikiran timses maupun calon kandidat, jika hanya

berkampanye mengumbar visi dan misi di anggap tidak akan efektif oleh para calon. Alternatif paling tepat adalah trik *money politic* dan kepercayaan para calon dapat dengan mudah mempengaruhi masyarakat.

Hepotesa awal penulis, karena pengaruh *money politic* begitu menguasai persepsi masyarakat dalam memilih calon kandidat, apalagi bagi masyarakat menengah kebawah, hingga bermunculan suatu pemikiran bahwa pentingnya caleg memberikan uang untuk masyarakat pada saat berkampanye.

Setelah memahami latar belakang tersebut dapat dilihat bahwa ada permasalahan tentang persepsi masyarakat terhadap pengaruh *money politic* untuk kemenangan calon legislatif yang masih terjadi dalam pemilu 2019. Oleh sebab itu, dalam penelitian ini dipilih judul : ***Persepsi Masyarakat Terhadap Pengaruh Money Politik Pada Pemilihan Legislatif 2019 Di Kabupaten Bireuen (Studi Kasus Gampong Pulo Naleung)***

1.2 Rumusan Masalah

Setelah memahami tentang latar belakang, kuasa uang sangat diminati oleh para kandidat ataupun partai politik pada saat kontestasi pemilihan legislatif. Dari latar belakang masalah tersebut yang telah diuraikan di atas maka penulis membuat perumusan masalah yaitu : ***Persepsi Masyarakat Terhadap Pengaruh Money Politik Pada Pemilihan Legislatif 2019 Di Kabupaten Bireuen (Studi Kasus Gampong Pulo Naleung)***

1.3 Tujuan Pembahasan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui persepsi masyarakat terhadap pengaruh *money politic* pada pemilihan legislatif pada 2019 di Kabupaten Bireuen, serta untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi masyarakat terhadap Pengaruh *money politic* di Kabupaten Bireuen dan juga menilai persepsi masyarakat Gampong Pulo Naleung terhadap pengaruh *money politic*.

1.4 Manfaat Penelitian

Terdapat beberapa manfaat pada penelitian ini, Yaitu :

a). Manfaat Teoritis

1. Hasil pada penelitian ini sangat diharapkan dapat menjadikan pemahaman yang lebih luas mengenai Pengaruh *Money Politik* dalam ikut serta kontestasi pemilihan legislatif.
2. Hasil penelitian ini juga diharapkan mampu mengembangkan kemampuan berpikir dan kompetensi bagi mahasiswa, sekaligus dapat menjadi acuan referensi untuk penelitian-penelitian dimasa yang akan datang.

b). Manfaat Praktis

1. Memahami *money politic* sangat penting bagi semua Masyarakat. Hal ini bukan hanya sekedar menjadi referensi memenangkan pemilu, tetapi juga sebagai bahan pendidikan politik pemilih dan mendorong pemilu yang demokratis serta rasional.

2. Penelitian ini diharapkan lebih mengetahui mengenai Persepsi masyarakat yang memilih tanpa adanya mendapatkan pemahaman soal tatanan sistem politik sehingga terjadinya pembodohan terhadap Masyarakat.

1.5 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu bertujuan untuk mendapatkan bahan perbandingan dan sebagai bahan acuan, serta dapat memperkaya teori yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang dilakukan. Dengan demikian peneliti mencantumkan hasil-hasil penelitian terdahulu sebagai berikut:

Tabel 1.1
Penelitian Terdahulu yang Relevan

No	Peneliti	Hasil Penelitian	Hasil Penelitian
1	Erin Malindra Ramadhani	pengaruh <i>money politik</i> terhadap perilaku pemilih pemula masyarakat kecamatan candi dikabupaten sidoarjo dalam pemilihan presiden 2014	Hasil penelitian ini salah satunya menunjukkan : Bentuk <i>Money Politic</i> yang ada pada masyarakat Kecamatan Candi Di Kabupaten Sidoarjo dalam Pemilihan Presiden 2014 adalah yang menjawab berupa uang sebanyak 89 orang (48,10%), yang menjawab berupa barang sebanyak 50 orang (29,00%), dan yang menjawab berupa perbaikan infrastruktur/ fasilitas umum sebanyak 43 orang (23,00%).

2	Muhammad Suspin Selian	persepsi masyarakat terhadap politik uang pada pemilihan umum tahun 2019	Hasil penelitian menunjukkan bahwa, persepsi masyarakat Desa Kutacane Lama Kabupaten Aceh Tenggara terhadap praktik politik uang pada pemilu serentak 2019 terbagi dua yaitu persepsi positif dan negatif. Sebagian masyarakat ada yang membenarkan dan menerima dan ada pula yang tidak membenarkan dan menolak politik uang.
3	Muhammad Hoiru Nail	kualifikasi politik uang dan strategi hukum dan kultural atas pencegahan politik uang dalam pemilihan umum	tindakan politik uang (<i>money politic</i>) tidak serta merta pemberian uang/ materi lainnya dari peserta pemilu kepada pemilih, namun tindakan politik uang ialah sebuah tindakan yang unsur-unsur politik uang terpenuhi. bahwa rangkaian kampanye umum terbuka dengan penggantian uang transport, uang lelah dan uang makan bukan merupakan kategori politik uang (<i>money politic</i>), tindakan tersebut merupakan konversi atau kegiatan pelihan yang dialihkan ke acara kampanye terbuka, hal lain agar tindakan penggantian uang transport, uang lelah dan uang makan tidak menjadi kategori tindakan politik uang ialah harus diatur melalui peraturan perundang-undangan/ PKPU terkait besaran uang pengganti transport, uang lelah dan uang makan, selain itu hal yang perlu diperhatikan dalam acara kampanye terbuka ialah konten/sisi dari kampanye tidak boleh mengarahkan untuk seseorang tidak menggunakan suaranya oleh karena tidak akan memilih calon yang mengadakan kampanye terbuka.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Definisi Persepsi

Berdasarkan teori mengenai persepsi yang dikemukakan oleh seorang ahli dengan mengatakan bahwa “persepsi merupakan sebuah proses individu mengorganisasikan dan menginterpretasikan kesan sensoris untuk memberikan pengertian pada lingkungannya.” Teori tersebut memberikan gambaran bahwa persepsi merupakan upaya untuk melihat pendapat atau pandangan dari seseorang terhadap suatu keadaan yang terjadi disekililingnya dengan berdasarkan pada hal-hal yang dapat dirasakan oleh dirinya.⁷

Persepsi merupakan suatu proses yang dijalankan setiap individu untuk memahami suatu hal dalam lingkungannya, “persepsi adalah suatu proses yang ditempuh individu untuk mengorganisasikan dan menafsirkan kesan-kesan indera mereka agar memberikan makna bagi lingkungan mereka”.⁸

Dari pengertian tersebut dapat dikatakan bahwa persepsi merupakan suatu proses yang diperlukan oleh manusia untuk memahami serta mentafsirkan hal-hal yang terjadi disekililingnya. Sebagai suatu proses, persepsi tidak berupaya untuk mencari suatu hal yang tepat dan benar, namun persepsi hanya berupa penafsirannya, memahami pernyataannya hal terpenting dalam memahami persepsi adalah terletak pada pengenalan

⁷ Stephen, Robbins (2015), *Perilaku Organisasi*, Penerbit Salemba Empat, Jakarta. hlm 103.

⁸ Rivai, Veithzal dan Deddy Mulyadi. (2003). *Kepemimpinan dan Perilaku Organisasi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

bahwa persepsi yang unik terhadap situasi. Dan bukannya suatu pencatatan yang benar terhadap situasi.⁹

Persepsi adalah pengalaman tentang objek, peristiwa atau hubungan-hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan.¹⁰ Persepsi timbul karena adanya dua faktor baik internal maupun eksternal. Faktor internal antaranya tergantung pada proses pemahaman sesuatu termasuk di dalamnya sistem nilai tujuan, kepercayaan dan tanggapannya terhadap hasil yang dicapai. Faktor eksternal berupa lingkungan.¹¹ Persepsi pada hakikatnya adalah proses kognitif yang dialami oleh setiap orang didalam memahami informasi tentang lingkungannya, baik lewat penglihatan, pendengaran, penghayatan, perasaan, penciuman. Kunci untuk memahami persepsi adalah terletak pada pengenalan bahwa persepsi itu merupakan suatu penafsiran yang unik terhadap situasi, dan bukannya suatu pencatatan yang benar terhadap situasi.

Terbentuknya persepsi seseorang terhadap suatu objek pada lingkungannya didasarkan pada stimulasi atau situasi yang sedang dihadapinya, terkait pada kondisi masyarakat persepsi adalah proses yang menyangkut masuknya pesan atau informasi dalam otak manusia secara terus-menerus mengadakan hubungan dengan lingkungannya melalui indranya seseorang terhadap suatu objek, peristiwa ini dengan melibatkan

⁹ Dudih Sutrisman. Pendidikan Politik, Persepsi, Kepemimpinan, Dan Mahasiswa. Hlm. 76-75

¹⁰ Jalaluddin Rakhmat. Psikologi Komunikasi. Bandung: Remaja Rosdakarya. 2007. hal. 51.

¹¹ Miftah Thoha. Perilaku Organisasi: Konsep Dasar dan Aplikasinya. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2010. hal. 139.

pengalaman-pengalaman yang berkaitan dengan objek tersebut melalui proses kognisi, efeksi, dan konasi untuk membentuk suatu objek tersebut.¹²

Menurut Irwanto, sebagaimana dikutip oleh Eliska Pratiwi dkk, setelah individu melakukan interaksi dengan obyek-obyek yang dipersepsikan maka hasil persepsi dapat dibagi menjadi dua yaitu:

- Persepsi positif yaitu persepsi yang menggambarkan segala pengetahuan (tahu tidaknya atau kenal tidaknya) dan tanggapan yang diteruskan dengan upaya pemanfaatannya. Hal itu akan di teruskan dengan keaktifan atau menerima dan mendukung obyek yang dipersepsikan
- Persepsi negatif yaitu persepsi yang menggambarkan segala pengetahuan (tahu tidaknya atau kenal tidaknya) dan tanggapan yang tidak selaras dengan obyek yang di persepsi. Hal itu akan di teruskan dengan kepasifan atau menolak dan menentang terhadap obyek yang dipersepsikan.¹³

Demikian dapat dikatakan bahwa persepsi itu baik yang positif maupun yang negatif akan selalu mempengaruhi diri seseorang dalam melakukan sesuatu tindakan. Dan munculnya suatu persepsi positif ataupun persepsi negatif semua itu bergantung pada bagaimana cara individu menggambarkan segala pengetahuannya tentang suatu obyek yang dipersepsikan.

¹² Jurnal “Gema Kampus” Edisi Vol.13 No.1 Tahun 2018. Persepsi Masyarakat Terhadap politik uang (Money Politic) Dalam Setiap Pesta Demokrasi Di Kampung Soryar Distrik Biak Timur Kabupaten Biak Numfor

¹³ Eliska Pratiwi, I Nyoman Sujana dan Iyus Akhmad Haris, “Persepsi dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Penerapan Program Kerja BUMDES Dwi Amertha Sari di Desa Jinengdalem”, Jurnal Pendidikan Ekonomi Undiksha, Vol. 11 No.1/ 2019, 286

2.1.1.1 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pengembangan Persepsi

Persepsi ditentukan oleh faktor personal dan faktor situasional

- a. Faktor Fungsional : Faktor fungsional berasal dari kebutuhan, pengalaman masa lalu dan hal-hal lain yang termasuk dalam faktor-faktor personal. Persepsi tidak ditentukan oleh jenis atau bentuk stimuli, tetapi karakteristik orang yang memberikan respon pada stimuli tersebut.
- b. Faktor Struktural : Faktor struktural berasal dari sifat stimuli fisik dan efek-efek saraf yang ditimbulkannya pada sistem saraf individu.

Selain faktor kebutuhan di atas, terdapat pengaruh lingkungan terhadap cara individu melihat dunia yang dapat dikatakan sebagai tekanan-tekanan sosial.

Menurut Thoha, faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi seseorang adalah sebagai berikut :

- a. Faktor internal: perasaan, sikap dan karakteristik individu, prasangka, keinginan atau harapan, perhatian (fokus), proses belajar, keadaan fisik, gangguan kejiwaan, nilai dan kebutuhan juga minat, dan motivasi. Pengalaman : hal yang sama dengan latar belakang ialah faktor pengalaman, pengalaman mempersiapkan seseorang untuk mencari orang-orang, hal-hal, dan gejala-gejala yang mungkin serupa dengan pengalaman pribadinya.
- b. Faktor eksternal: latar belakang keluarga, informasi yang diperoleh, pengetahuan dan kebutuhan sekitar, intensitas, ukuran, keberlawanan,

pengulangan gerak, hal-hal baru dan familiar atau ketidak asingan suatu objek.¹⁴

Persepsi mungkin benar, mungkin salah, mungkin sempit, mungkin luas dan ini sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor yang terkait dengan proses terjadinya persepsi.

2.1.2 *Money Politic*/Politik Uang

Money politic dalam Bahasa Indonesia adalah suap, arti suap dalam buku kamus besar Bahasa Indonesia adalah uang sogok.¹⁵ Politik uang adalah pertukaran uang dengan posisi/kebijakan/keputusan politik yang mengatasnamakan kepentingan rakyat tetapi sesungguhnya demi kepentingan pribadi/kelompok/partai.¹⁶ Istilah *money politic* ialah menggunakan uang untuk memengaruhi keputusan tertentu, dalam hal ini uang dijadikan alat untuk memengaruhi seseorang dalam menentukan keputusan.¹⁷

Politik Uang dapat diartikan sebagai upaya mempengaruhi perilaku orang lain dengan menggunakan imbalan tertentu. Ada yang mengartikan politik uang sebagai tindakan jual beli suara pada proses politik dan kekuasaan. Tindakan itu bisa terjadi dalam jangkauan (*range*) yang lebar, dari pemilihan kepala desa sampai pemilihan umum suatu negara.¹⁸

¹⁴ Hadi Suprpto Arifin, Ikhsan Fuady, Engkus Kuswarno. Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Persepsi Mahasiswa Unirta Terhadap Keberadaan Perda Syariah Di Kota Serang Jurnal Penelitian Komunikasi dan Opini Publik Vol. 21 No.1, Juli: 88-101

¹⁵ Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, Edisi Kedua, 1994), 965.

¹⁶ Didik Supriyanto, Koordinator Pengawasan Panwas Pemilu, <http://www.panwaslu.com>, Jum'at.

¹⁷ Ebin Danius, Politik Uang dan Uang Rakyat, Universitas Halmahera, 1999, dalam www.uniera.ac.id/pub/1/1/. Diakses 5 januari 2017.

¹⁸ Ismawan, Indra. 1999. Money Politics Pengaruh Uang Dalam Pemilu, Yogyakarta: Media Presindo, hal.5

Abdul Kholiq mengartikan *Money Politic* adalah suatu tindakan membagikan uang atau materi lainnya, baik milik pribadi dari seorang politisi atau milik partai untuk mempengaruhi suara pemilu yang diselenggarakan. Jadi *money politic* merupakan upaya memengaruhi orang lain dengan menggunakan imbalan materi pada proses politik dan kekuasaan bernama Pemilu.¹⁹

Untuk kasus *money politic* di Indonesia, Teten Masduki yaitu seorang aktifis dan politisi Indonesia menyebutkan bahwa *money politic* berbeda dengan ongkos politik (*political cost*). *Money politic* menurutnya ialah pemberian uang, atau barang, atau fasilitas tertentu, dan janji kepada orang-orang tertentu agar seseorang dapat dipilih apakah misalnya menjadi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah. Sedangkan biaya politik (*political cost*) misalnya biaya kampanye yang dikeluarkan oleh seorang calon untuk memenangkan suatu jabatan, biaya sang calon mengadakan pertemuan dengan tamu dan para pendukungnya atau bila si calon datang ke suatu tempat untuk berkampanye untuk kemenangannya dapat dikatakan ini adalah *money politic*, atau biaya, atau ongkos politik. Biaya atau ongkos politik memiliki aturan yang kesemuanya berdasarkan kesepakatan yang dibuat. Artinya aliran dana yang digunakan jelas dan merujuk kepada tata aturan sebagaimana yang telah diatur oleh PP No. 6 Tahun 2005.²⁰

Melihat berbagai macam pengertian *money politic* penulis menyimpulkan *money politic* yaitu suatu perbuatan yang dengan sadar dilakukan oleh seseorang dengan

¹⁹ M. Abdul Kholiq, Perspektif Hukum Pidana tentang Fenomena Money Politic dan Korupsi Politik dalam Pemilu, 2014, makalah disampaikan dalam Seminar Nasional Mewujudkan Pemilu yang Demokratis, Forum Kajian dan Penulisan Hukum (FKPH) Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta Tanggal 22 Maret 2014.

²⁰ Ibrahim Z. Fahmy Badoh Abdullah Dahlan, Korupsi Pemilu di Indonesia, (Jakarta Selatan: Indonesia Corruption Watch, 2010), hlm. 22.

memberikan sesuatu dalam berbentuk uang maupun hadiah lainnya kepada seseorang supaya menggunakan hak pilihnya dengan harapan mereka memberikan suaranya untuk memilih calon tersebut.

2.1.2.1 Persepsi Masyarakat Terhadap Pengaruh *Money Politic*

Melihat pada kondisi politik yang berkembang pada saat ini, sebagian besar masyarakat sarat dengan praktek *money politic* baik pada saat pemilihan kepada desa, Legislatif hingga Presiden. Dikemas dalam berbagai bentuk seperti pemberian hadiah, pembagian sembako, uang transport dan sebagainya. karena sudah melekatnya dengan masyarakat seakan akan tidak ada ruang untuk memberantasnya. Masyarakat mengetahui bahwa pemberian uang tersebut tidak dilakukan secara ikhlas, melainkan ada tuntutan untuk memilih calon tersebut pada proses pemilihan. Hal tersebut membuktikan bahwa masyarakat tahu namun tidak dapat menolaknya karena alasan uang tersebut merupakan salah satu rezeki tambahan demi memenuhi kebutuhan ekonomi keluarganya.²¹

Kesulitan mengambil persepsi yang tegas dikalangan pemimpin masyarakat cukup membingungkan masyarakat. Ketika beberapa keagamaan menyatakan bahwa *money politic* itu haram,, penilaian beberapa agamawan yang lain tidak sektekrem itu. Mantan Menteri agama malik fadjar, seperti yang dikutip oleh ismawan dalam *money politic* pengaruh uang dalam pemilu, tidak mau secara tegas mengatakan hukum praktik *money politic* itu haram. Dia mengaku sulit mengatakan hukumnya dengan dalil yang

²¹ Jurnal “Gema Kampus” Edisi Vol.13 No.1 Tahun 2018. Persepsi Masyarakat Terhadap politik uang (Money Politic) Dalam Setiap Pesta Demokrasi Di Kampung Soryar Distrik Biak Timur Kabupaten Biak Numfor.

jelas yang berkaitan langsung dengan soal ini.²² Akhirnya, sulit dibedakan antara pemberian yang tergolong risywah (*suap*) dan pemberian yang tergolong amal jariyah. Dan ketidakpastian hukum ini menjadi salah satu penyebab maraknya praktik *money politic*.²³

2.1.2.2 Bentuk-Bentuk *Money Politic*

Beberapa bentuk dari *Money Politic* yang umum terjadi di Indonesia yaitu *Money Politic* pada lapisan atas yaitu transaksi antara elit ekonomi atau pemilik modal, dengan elit politik atau calon, dengan janji atau harapan setelah terpilih akan mendapatkan kebijakan yang menguntungkan pemilik modal. Hal ini terjadi karena dengan keterbatasan dana anggota partai untuk menyumbang partai, maka sangat mungkin partai mengambil jalan pintas dengan sumber dana dari elit ekonomi, kantong pribadi calon serta uang negara yang tidak halal. *Money Politic* lapisan tengah, antara elit politik yaitu bakal calon dengan elit partai, dalam bentuk pembayaran kepada pribadi elit partai untuk menjadi calon atau menentukan nomor urut calon atau antara calon dengan penyelenggara untuk membeli suara atau mengatur pemilih. *Money Politic* dilapisan bawah yaitu transaksi antara elit politik atau calon dengan masa pemilih, Bentuknya berupa uang, sembako, kredit ringan atau bentuk lainnya pemberian uang atau barang lainnya yang tidak patut.

²² Ismawan, Indra, 1999, *Money Politics Pengaruh Uang Dalam Pemilu*, Yogyakarta: Penerbit Media Presindo

²³ Persepsi masyarakat terhadap politik uang pada pilkada serentak. La ode suprianto. *Neo societal*; Vol.2:No.1. hal 3

Hamdan Zoelva mengemukakan terdapat tiga bentuk *money politic* yang umum terjadi di Indonesia yaitu:²⁴

- *Money politic* pada lapisan atas yaitu transaksi antara elit ekonomi/pemilik modal, dengan elit politik atau calon, dengan janji/harapan setelah terpilih akan mendapatkan kebijakan yang menguntungkan pemilik modal. Inilah *money politic* yang berdampak sangat strategis dalam kehidupan politik. Pemilik modal dapat mendikte kebijakan partai atau calon ketika telah memenangkan pemilihan. Hal ini terjadi karena dengan keterbatasan dana anggota partai untuk menyumbang partai, maka sangat mungkin partai mengambil jalan pintas dengan sumber dana dari elit ekonomi, kantong pribadi calon serta uang negara yang tidak halal.
- *Money politic* lapisan tengah, antara elit politik yaitu bakal calon dengan elit partai, dalam bentuk pembayaran kepada pribadi elit partai untuk menjadi calon atau menentukan nomor urut calon atau antara calon dengan penyelenggara untuk membeli suara atau mengatur pemilih.
- *Money politic* dilapisan bawah yaitu transaksi antara elit politik atau calon dengan masa pemilih. Bentuknya berupa uang, sembako, kredit ringan atau bentuk lainnya pemberian uang atau barang lainnya yang tidak patut.

²⁴ Hamdan Zoelva, 2014, Instrumen Hukum dan Penindakan Money Politic. Disampaikan pada Seminar Nasional Instrumen Hukum Pencegahan Dan Penindakan Praktik Ilegal Dalam Pemilu 2014 Hanns Seidel Foundation (Hsf) Indonesia-Pusat Studi Hukum Konstitusi (Pshk) Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

2.1.2.3 Faktor Terjadinya *Money Politic*

Ada beberapa penyebab mengapa banyak rakyat yang terlibat dalam *money politic*, antara lain:²⁵

- Sudah Tradisi

money politic sudah menjadi turun temurun dari tahun ketahun dan menjadi kebiasaan terutama oleh beberapa kelompok orang yang punya banyak uang.

- Lingkungan yang Mendukung

Bukan sebuah rahasia lagi jika praktik *money politic* atau risywah (*suap-menyuap*) mulai dari institusi kecil sampai ke kalangan pejabat-pejabat tinggi negara adalah sebuah jaringan yang terorganisir.

- Masyarakat Miskin

Sebagaimana kita ketahui angka kemiskinan di Indonesia cukup tinggi.²⁶ *Money politic* menjadi ajang para rakyat untuk berebut uang. Mereka yang menerima uang terkadang tidak memikirkan konsekuensi yang akan diterima, yaitu tindakan suap dan jual beli suara yang jelas melanggar hukum. Yang terpenting adalah mereka mendapat uang dan dapat memenuhi kebutuhan hidupnya.

- Lemahnya Pendidikan Politik

Tidak semua orang tahu apa itu politik, bagaimana bentuknya, serta apa yang ditimbulkan dari politik. Sehingga ketika ada pesta politik seperti pemilu,

²⁵ Leo Agustino, *Pilkada dan Dinamika Politik Lokal* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), hal. 43

²⁶ Amrullah Ahmad, dkk, *Dimensi Hukum Islam Dalam System Hukum Nasional* (Jakarta: Gema Insan Press, 1999), hal. 146.

masyarakat tersebut tidak peduli dengan pemilu. Kondisi seperti ini menyebabkan maraknya *money politic*

2.1.2.4 Money Politic Pada Pemilihan Legislatif

Pemilihan legislatif merupakan sarana perwujudan kedaulatan rakyat, sekaligus sarana aktualisasi partisipasi masyarakat sebagai pemegang kedaulatan dalam penentuan jabatan politik. Sebagai pemegang kedaulatan, melainkan ditempatkan sebagai subyek, termasuk dalam mengawal integritas pemilu. Merujuk ke pelaksanaan pemilu 1999, terdapat tiga bentuk umum dari praktik politik uang. Pertama, dalam bentuk pemberian uang suap (*bribery*) kepada pemilih untuk memilih partai politik tertentu, uang suap ini disalurkan melalui beberapa jalur. Kedua, adalah mobilisasi dana dari badan atau program pembangunan pemerintah. Ketiga, mobilisasi dana dari pihak ketiga (perorangan, lembaga atau perusahaan).

Dari fenomena yang terjadi selama ini, *money politic* terjadi pada dua level, yaitu level individual dan level institusi. Pada level individual, praktik *money politic* banyak terealisasi menjelang event-event politik yang melibatkan kepentingan individu sebagai aktor politik untuk menduduki atau mempertahankan jabatan-jabatan strategis dalam pemerintahan. Sementara, *money politic* pada level institusional banyak terjadi dan terlegitimasi di tingkat partai politik. Bagaimana praktik *money politic* dirancukan dengan penggalan sumber-sumber keuangan partai, bagaimana praktik ini kemudian juga dicampur adukkan dengan kepentingan kampanye partai dan

sebagainya, telah membawa pada kesimpulan bahwa praktik ini telah terinstitusi dengan sangat baik di dalam lingkungan partai.²⁷

2.3 Landasan Hukum Tentang Pemilu

Soerjono Soekanto mengatakan bahwa penegakan hukum dapat berjalan dengan baik apabila terpenuhinya beberapa faktor, yaitu faktor hukum, penegak hukum, sarana, masyarakat, dan budaya.²⁸

Sesuai ketentuan Pasal 22E ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah diselenggarakan berlandaskan azas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali. Pemilihan umum dimaksud diselenggarakan dengan menjamin prinsip keterwakilan, yang artinya setiap orang Warga Negara Indonesia terjamin memiliki wakil yang duduk di lembaga perwakilan yang akan menyuarakan aspirasi rakyat di setiap tingkatan pemerintahan, dari pusat hingga, ke daerah.²⁹

Dengan asas langsung, rakyat sebagai pemilih mempunyai hak untuk memberikan suaranya secara langsung sesuai dengan kehendak hati nuraninya, tanpa perantara. Pemilihan yang bersifat umum mengandung makna menjamin kesempatan yang berlaku menyeluruh bagi semua warga negara, tanpa diskriminasi berdasarkan suku, agama, ras,

²⁷ Ismawan, Indra. 1999. Money Politik Pengaruh Uang Dalam Pemilu, Yogyakarta: Media Presindo. Hal 214

²⁸ Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2011 hlm. 7 -26

²⁹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2008

golongan, jenis kelamin, kedaerahan, pekerjaan, dan status sosial. Setiap warga negara yang berhak memilih bebas menentukan pilihannya tanpa tekanan dan paksaan dari siapa pun. Di dalam melaksanakan haknya, setiap warga negara dijamin keamanannya oleh negara, sehingga dapat memilih sesuai dengan kehendak hati nurani. Dalam memberikan suaranya, pemilih dijamin bahwa pilihannya tidak akan diketahui oleh pihak mana pun. Pemilih memberikan suaranya pada surat suara dengan tidak dapat diketahui oleh orang lain. Dalam penyelenggaraan pemilu, penyelenggara pemilu, aparat pemerintah, peserta pemilu, pengawas pemilu, pemantau pemilu, pemilih, serta semua pihak yang terkait harus bersikap dan bertindak jujur sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Setiap pemilih dan peserta pemilu mendapat perlakuan yang sama, serta bebas dari kecurangan pihak manapun.

2.3.1 Dasar Hukum Yang Mengatur Larangan *Money Politic*

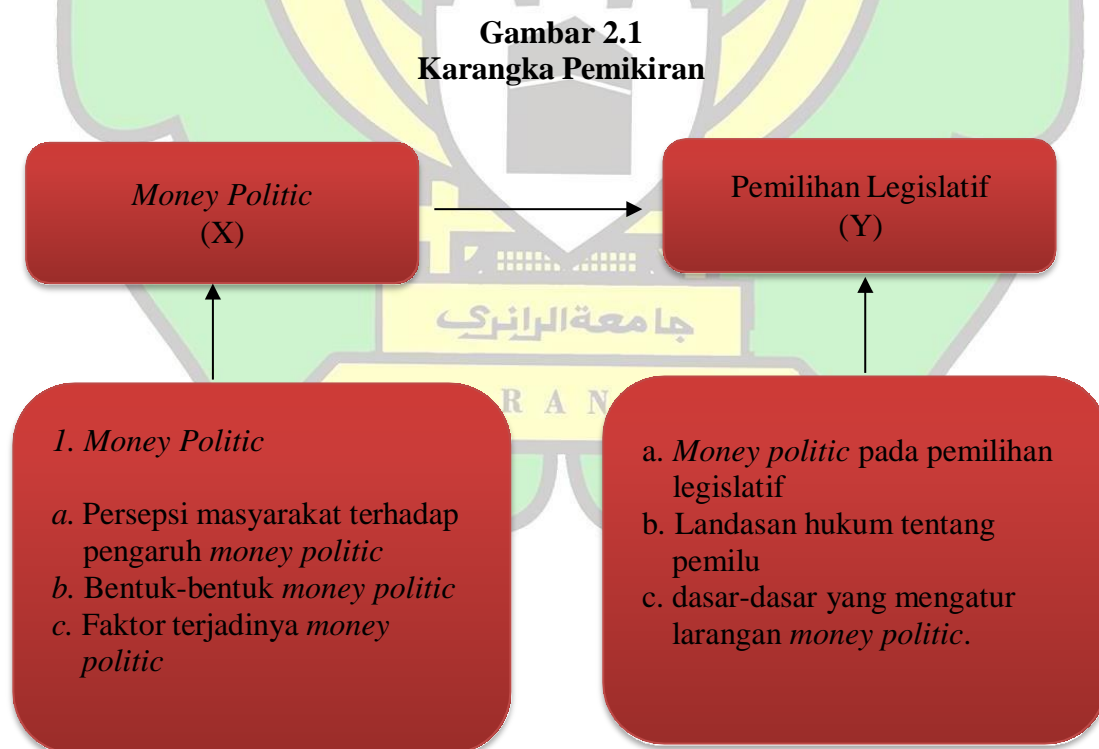
Praktik *money politic* merupakan suatu tindak pidana pemilu, yang ketentuan dan sanksinya telah diatur dalam undang-undang pemilu yang baru yaitu Undang-undang No 7 Tahun 2017 tentang Pemilu telah menyempurnakan undang-undang yang lama termasuk pengaturan mengenai tindak pidananya. Tindak pidana pemilu adalah semua tindak pidana yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu yang diatur didalam undang-undang pemilu maupun diatur di dalam undang-undang tindak pidana pemilu.³⁰ Orang yang melakukan *money politic* secara hukum dapat dijerat dengan pidana sebagaimana diatur dalam Undang-undang Pemilu. Selain itu, jika terbukti melakukan

³⁰ Topo Santoso, Tindak Pidana Pemilu, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006) hlm.5

praktik *money politic* maka orang yang melakukan tersebut dan terpilih sebagai anggota DPR, ataupun DPD dapat diturunkan.

dijelaskan pada Pasal 139 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2003,³¹ telah dikemukakan sebelumnya, yang intinya bahwa calon legislatif dilarang memberi atau menjanjikan uang kepada seseorang untuk menggunakan hak pilihnya. Apabila hal tersebut dilakukan oleh calon legislatif akan diancam dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua bulan) atau paling lama 12 (dua belas) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) atau paling banyak Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

2.4 Karangka Pemikiran



³¹ Pasal 139 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2003

Karakteristik Responden :

- a) Umur Responden
- b) Jenis Kelamin Responden
- c) Status Perkawinan Responden
- d) Pendidikan Responden
- e) Pekerjaan Responden

Berdasarkan tabel diatas, diasumsikan bahwa masyarakat telah banyak dipengaruhi oleh praktik *money politic* sehingga tidak sedikit dari masyarakat menerima pemberian dari para calon kandidat. Semua itu dikarenakan masih banyak masyarakat yang tidak tahu apa itu politik, Melihat pada kondisi politik saat ini, sebagian besar masyarakat sarat dengan praktek *money politic*. Karena sudah melekatnya dengan masyarakat seakan akan *money politic* telah menjadi bagian dari pemilu. Masyarakat mengetahui bahwa pemberian uang tersebut tidak dilakukan secara ikhlas, melainkan ada tuntutan untuk memilih calon tersebut pada proses pemilihan. Hal tersebut membuktikan bahwa masyarakat tahu namun tidak dapat menolaknya karena alasan uang tersebut merupakan salah satu rezeki tambahan demi memenuhi kebutuhan ekonomi keluarganya. Adapun beberapa faktor yang dapat mempengaruhi terjadinya *money politic*, yaitu: sudah tradisi, lingkungan yang mendukung, masyarakat miskin dan lemahnya pendidikan politik. *Money politic* yang dilakukan berbentuk, seperti: berbentuk uang dan barang, serta berbentuk fasilitas umum.

2.5 Hipotesis

Hipotesis merupakan suatu anggapan sementara yang dibuktikan kebenarannya dalam suatu penelitian. Berdasarkan fenomena dan dari landasan teori yang telah dikemukakan sebelumnya, maka beberapa hipotesis alternatif dapat dinyatakan sebagai berikut.

H₁ : *Money Politic* berpengaruh terhadap pemilihan legislatif pada tahun 2019

H₀ : *Money Politic* tidak berpengaruh terhadap pemilihan legislatif pada tahun 2019.



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, rancangan penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif merupakan metode-metode untuk menguji teori-teori tertentu dengan cara meneliti hubungan antar variabel. Variabel-variabel ini diukur sehingga data yang terdiri dari angka-angka dapat dianalisis berdasarkan prosedur-prosedur statistik.³² Pada dasarnya, pendekatan kuantitatif dilakukan pada penelitian inferensial (dalam rangka pengujian hipotesis) dan menyandarkan kesimpulan hasilnya pada suatu probabilitas kesalahan penolakan hipotesis nihil.³³ Dengan metode kuantitatif akan diperoleh signifikansi perbedaan kelompok atau signifikansi hubungan antar variabel yang diteliti. Pada umumnya, penelitian kuantitatif merupakan penelitian sampel besar.

3.2 Definisi Operasional Variabel

3.2.1 Definisi Variable

Variable penelitian adalah suatu atribut atau sifat, nilai dari orang atau obyek kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang diterapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan ditarik kesimpulannya. Pada penelitian ini terdapat dua variabel yang dapat diukur,

³² Creswell, John W. 2012. *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Hlm 5

³³ Saifuddin, Azwar. *Metode Penelitian*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), hlm. 5

Dua variabel yang akan diteliti yaitu variabel bebas dan variabel terikat. Adapun penjelasan mengenai variabel dalam penelitian ini yaitu Variabel *dependent* atau variabel terikat dengan simbol (Y) yaitu sebagai Pemilihan Legislatif dan Variabel *independent* atau variabel bebas dengan simbol (X), yaitu *money politic*. Dan operasional variable sebagaimana tersebut pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.1
Operasional Variabel dan Indikator

Variable	Deskripsi	Indikator	Skala Pengukuran
<i>Money Politic</i> (X)	<i>Money Politic</i> adalah suatu tindakan membagi-bagikan uang atau materi lainnya, baik milik pribadi dari seorang politisi atau milik partai untuk mempengaruhi suara pemilu yang diselenggarakan. Jadi <i>money politic</i> merupakan upaya memengaruhi orang lain dengan menggunakan imbalan materi pada proses politik dan kekuasaan bernama Pemilu.	<ol style="list-style-type: none"> 1. persepsi <i>money politic</i> dikalangan masyarakat 2. pengaruh <i>money politic</i> pada saat pemilu 	Likert
Pemilihan Legislatif (Y)	Pemilihan legislative merupakan sarana perwujudan kedaulatan rakyat, sekaligus sarana aktualisasi partisipasi masyarakat sebagai pemegang kedaulatan dalam penentuan jabatan politik. Sebagai pemegang kedaulatan, melainkan ditempatkan sebagai subyek, termasuk dalam mengawal integritas pemilu.	<ol style="list-style-type: none"> 1. azas langsung, 2. umum, 3. bebas, 4. rahasia, 5. jujur, 6. adil 	likert

3.3 Fokus Penelitian

Fokus penelitian yang akan saya teliti tentang, “Persepsi masyarakat terhadap pengaruh *money politic* pada pemilihan legislatif Tahun 2019 di Kabupaten Bireuen (Studi kasus: Gampong Pulo Naleung).

3.4 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Gampong Pulo Naleung dengan alasan sebagai berikut:

1. Berdasarkan pengamatan sementara peneliti, didaerah tersebut terdapat praktek *money politic* atau pemberian uang ke warga-warga sekitar lokasi penelitian setiap mendekati pemilu.
2. Adanya relevansi masalah yang akan diteliti di daerah tersebut.
3. Lokasi relatif dekat dengan domosili peneliti, sehingga mudah dijangkau dan bisa lebih efisien (waktu dan biaya).

3.5 Populasi dan Sampel

3.5.1. Populasi

Dalam penelitian ini yang menjadi populasi adalah seluruh masyarakat yang ada di Kabupaten Bireuen, namun tidak semua populasi akan dijadikan sampel untuk menggali data. Ada beberapa alasan mengapa hal tersebut dilakukan, diantaranya:

1. Pengambilan informan/Responden yang digunakan dalam penelitian ini adalah Sequential yang mana informan/Responden yang dipilih tidak ditentukan batasannya, jumlahnya akan bertambah jika peneliti menilai data yang

dikumpulkan dari sejumlah informan/responden belum cukup memberikan hasil analisis yang sesuai dan akan mencapai harapan serta sudah tidak ada hal baru lagi yang akan dikembangkan. Adapun Responden yang diambil mewakili Masyarakat Gampong Pulo Naleung

2. Penelitian ini mengkhususkan pada beberapa karakteristik informan/ narasumber yakni individu yang pernah mendapat atau berpartisipasi langsung dalam kegiatan *money politic* tersebut
3. Jumlah dari Informan/Responden juga dibatasi sesuai dengan Sampel yang dijelaskan sesuai dengan metode kuantitatif, yaitu adalah sebagian atau wakil dari populasi yang akan diteliti. Apabila subyek penelitian kurang dari 100, lebih baik diambil semua, sedangkan untuk subyek yang lebih dari 100 maka dapat diambil antara 10-15 % atau 20-25 %.³⁴

3.5.2. Sampel

Menurut Arikunto³⁵, sampel adalah sebagian atau wakil dari populasi yang akan diteliti. Sebuah penelitian dikatakan penelitian sampel apabila peneliti bermaksud untuk menggeneralisasikan hasil penelitian sampel. Adapun yang dimaksud dari menggeneralisasikan adalah mengangkat kesimpulan penelitian sebagai suatu yang berlaku bagi populasi. Sedangkan menurut Nasution³⁶ sampling adalah memilih sejumlah

³⁴ Arikunto, Suharsimi. 2006. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta. Hlm 131-134.

³⁵ Arikunto, Suharsimi.. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*. (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), hal. 109.

³⁶ Nasution. *Metode Research (Penelitian Ilmiah)*. (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), hal. 86.

tertentu dari keseluruhan populasi. Bila jumlah populasi terlampaui besar kita ambil sejumlah sampel yang representatif, yaitu yang mewakili keseluruhan populasi itu.

Ada beberapa teknik pengambilan sampel penelitian, namun yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik sampel random atau sampel acak. Teknik sampel random atau sampel acak adalah peneliti memilih subyek secara acak dan seluruh sampel dianggap sama. Dengan kata lain, peneliti memberi hak yang sama terhadap subjek untuk memperoleh kesempatan (*chance*) dipilih menjadi sampel. Oleh karena subjek memiliki hak yang sama, maka peneliti terlepas dari perasaan ingin mengistimewakan satu atau beberapa subjek yang beruntung untuk dijadikan sampel dalam penelitian ini. Adapun cara untuk menarik sampel random atau sampel acak pada penelitian ini menggunakan cara undian. Sampel penelitian ini adalah 10% dari jumlah populasi.

Peneliti mengambil sampel dari Masyarakat Kabupaten Bireuen yang berada di Gampong Pulo Naleung. Maksud dari peneliti adalah menggunakan sampel untuk memudahkan penelitian. Jika populasinya besar, peneliti tidak dapat memasukkan semua informan kedalam suatu penelitian. Maka dari itu, sampel harus representatif yang diambil dari jumlah populasi.

Dalam penelitian ini, populasinya berjumlah 928 pemilih, maka penelitian ini merupakan penelitian sampel. Dengan berbagai pertimbangan, penelitian ini mengambil sampel 10% dari keseluruhan populasi yang berjumlah 928 pemilih, dimana terdapat 470 pemilih berjenis kelamin laki-laki dan 458 pemilih berjenis kelamin

perempuan.³⁷ Maka sampel yang digunakan berjumlah 92,8 dan dibulatkan menjadi 93 pemilih. Berikut tabel dengan menggunakan rumus Solvin :

$$n = \frac{N}{1+N(e)^2}$$

Dimana :

n= Ukuran sampel

N= Ukuran populasi

1= Konstanta

e= Pengambilan sampel yang dapat ditolerir³⁸

Tabel 3.2
Jumlah sampel penentuan informan 2019

Tahun 2019
$n = \frac{928}{1 + 928 (10\%)^2}$
$n = \frac{928}{1 + 928 (0,01)}$
$n = \frac{928}{10}$
$n = 92,8 = 93$

³⁷ Kantor KIP kabupaten Bireuen

³⁸Sudarji, "PENGARUH PERSEPSI MASYARAKAT PADA PARTAI POLITIK TERHADAP PERILAKU PEMILIH DALAM PEMILU LEGISLATIF 2009 DI KECAMATAN BANCAR KABUPATEN TUBAN", (Surabaya: IAIN Sunan Ampel, 2013). Hlm 44-46.

Jadi, jumlah sampel dalam penelitian yakni 92,8 dan dibulatkan menjadi 93 orang

Berdasarkan teknik pengambilan sampel yang dilakukan dengan cara simple random sampling tersebut, maka diambil 93 orang informan yang dipilih sesuai dengan mewakili jumlah pemilih Gampong Pulo Naleung.

3.6. Teknik Pengumpulan Data

Dalam mengumpulkan data dan informasi yang dibutuhkan maka penulis melakukan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

1. **Data primer** adalah data yang langsung diperoleh langsung dari sumber data pertama dilokasi penelitian atau objek penelitian. Dalam kaitannya dengan penelitian mengenai *Money Politic* di Gampong Pulo Naleung Kabupaten Bireuen, maka pengumpulan data penelitian ini dilakukan melalui kuesioner.³⁹
2. **Data Sekunder** adalah data-data yang diperoleh dan digunakan untuk mendukung data, informasi data primer. Adapun data skunder tersebut adalah dokumen, buku-buku, Undang-Undang, Jurnal, majalah-majalah, media cetak, koran serta catatan-catatan yang berkaitan dengan judul yang diambil peneliti.

³⁹ Bambang Prasetyo.2013. Metode Penelitian Kuantitatif Teori dan Aplikasinya .Jakarta: Raja Grafindo Persada. hal.123.

3.7 Skala Pengukuran

Skala pengukuran adalah kesepakatan yang digunakan sebagai acuan tolak ukur untuk menentukan panjang pendek nya interval yang ada pada alat ukur ttersebut bila digunakan dalam pengukuran akan menghasilkan data.⁴⁰

Skala Likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang kejadian atau gejala sosial. Setiap jawaban dihubungkan dengan bentuk pernyataan atau dukungan sikap yang diungkapkan dengan kata-kata sebagai berikut:

Tabel 3.4
Skala Likert

Keterangan	Bobot Jawaban
Sangat	5
Setuju	4
Kurang Setuju	3
Tidak Setuju	2
Sangat tidak setuju	1

3.8 Pengujian Instrumen Penelitian

3.8.1 Uji Validitas

Uji Validitas adalah ketepatan antara data yang terkumpul dengan data yang sesungguhnya terjadi pada obyek yang diteliti. Uji validitas dilakukan untuk mengungkapkan apakah pertanyaan pada kuesioner tersebut sah atau tidak. Dengan

³³ Sumadi Suryabrata, Metodologi Penelitian, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2014), hlm. 60

demikian akan menghasilkan suatu hasil pengukuran dari variabel yang akan diteliti dengan tepat dan akurat. Validitas dapat diukur menggunakan rumus *Product moment*, yaitu:

$$r_{xy} = \frac{n \sum xy - (\sum x)(\sum y)}{\sqrt{n(\sum x^2 - (\sum x)^2)(\sum y^2 - (\sum y)^2)}}$$

Keterangan:

r_{xy} = Koefisien korelasi antara variabel *independent* dengan variabel *dependent* (*Product moment*)

x = Nilai total jawaban dari masing-masing nomor dari responden

y = Total butir dari jawaban responden

$\sum x$ = Jumlah skor butir

$\sum xy$ = Jumlah kali antara x dan y

n = Jumlah responden

Nilai *product moment pearson* berdasarkan hasil analisis (r_{hitung}) tersebut dibandingkan dengan *product moment pearson* tabel (r_{tabel}) dengan taraf signifikan ($\alpha = 5\%$). Instrument dikatakan valid jika $r_{hitung} > r_{tabel}$, dan jika instrument tersebut memiliki $r_{hitung} < r_{tabel}$ maka dinyatakan tidak valid.⁴¹

3.8.2 Uji Realibilitas

Uji reabilitas menunjukkan sejauh mana suatu hasil pengukuran relatif konsisten apabila pengukuran terhadap aspek yang sama pada alat ukur yang sama. Dalam menguji

³⁴ Sumadi Suryabrata, Metodologi Penelitian, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2014), hlm. 65

reliabilitas digunakan uji konstistensi internal dengan menggunakan rumus *Alpha Cronbach* sebagai berikut.

$$r_{11} = \frac{k}{k-1} \left(1 - \frac{\sum \sigma_b^2}{V_t^2} \right)$$

Dimana:

r_{11} =Reliabilitas Instrument

k =Banyaknya butir pertanyaan/pernyataan banyaknya soal

$\sum \sigma_b^2$ =Jumlah varian butir/item

V_t^2 =Varian total

Cara untuk mengukur reliabilitas dengan *cronbach's alpha*, dengan kriteria sebagai berikut:

- a) Kurang dari 0.6 tidak reliabilatas
- b) 0.7 – 0.7 akseptabel
- c) 07 – 0.8 baik
- d) Lebih dari 0.8 reliabel

3.8.3 Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam metode regresi, variable pengganggu atau residua memiliki distribusi normal. Pengujian uji normalitas menggunakan uji *Kolmogrov-Smirnov* dengan dasar pengambilan keputusan apabila signifikansi $>0,05$ maka data tersebut terdistribusi normal, namun sebaliknya, apabila nilai signifikansi $<0,05$ maka data tersebut tidak terdistribusi normal. model regresi yang baik adalah model regresi yang mempunyai distribusi normal atau mendekati normal, sehingga layak dilakukan pengujian secara statistik.

2.8.4 Uji Linearitas

Uji linearitas bertujuan untuk mengetahui dua variabel memiliki keterkaitan yang linier atau tidak secara signifikan. Pengujian SPSS dengan menggunakan *Test for Linearity* pada taraf signifikansi 0,05. Dua variabel memiliki hubungan linier jika signifikansi kurang dari 0,05.

3.9 Rancangan Analisis

Teknik pengujian hipotesis yang digunakan dalam penelitian ialah korelasi sederhana yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- a. Rumus yang digunakan untuk mencari koefisien korelasi adalah korelasi *Product moment*.

$$r_{xy} = \frac{n \sum xy - (\sum x)(\sum y)}{\sqrt{n(\sum x^2 - (\sum x)^2)(\sum y^2 - (\sum y)^2)}}$$

r_{xy} = Koefisien korelasi antara variabel *independent* dengan variabel *dependent (Product moment)*

x = Variabel *independent*

y = Variabel *dependent*

n = Jumlah responden

- b. Melakukan uji signifikansi dengan uji t

Untuk membuktikan apakah hipotesis tersebut diterima atau ditolak, maka diadakan uji signifikansi dengan statistik uji t dengan rumus sebagai berikut:

$$t_{hitung} = \frac{r\sqrt{n-2}}{\sqrt{1-r^2}}$$

Keterangan:

t_{hitung} = nilai t hitung yang dicari

r = koefisien korelasi

r^2 = koefisien determinasi

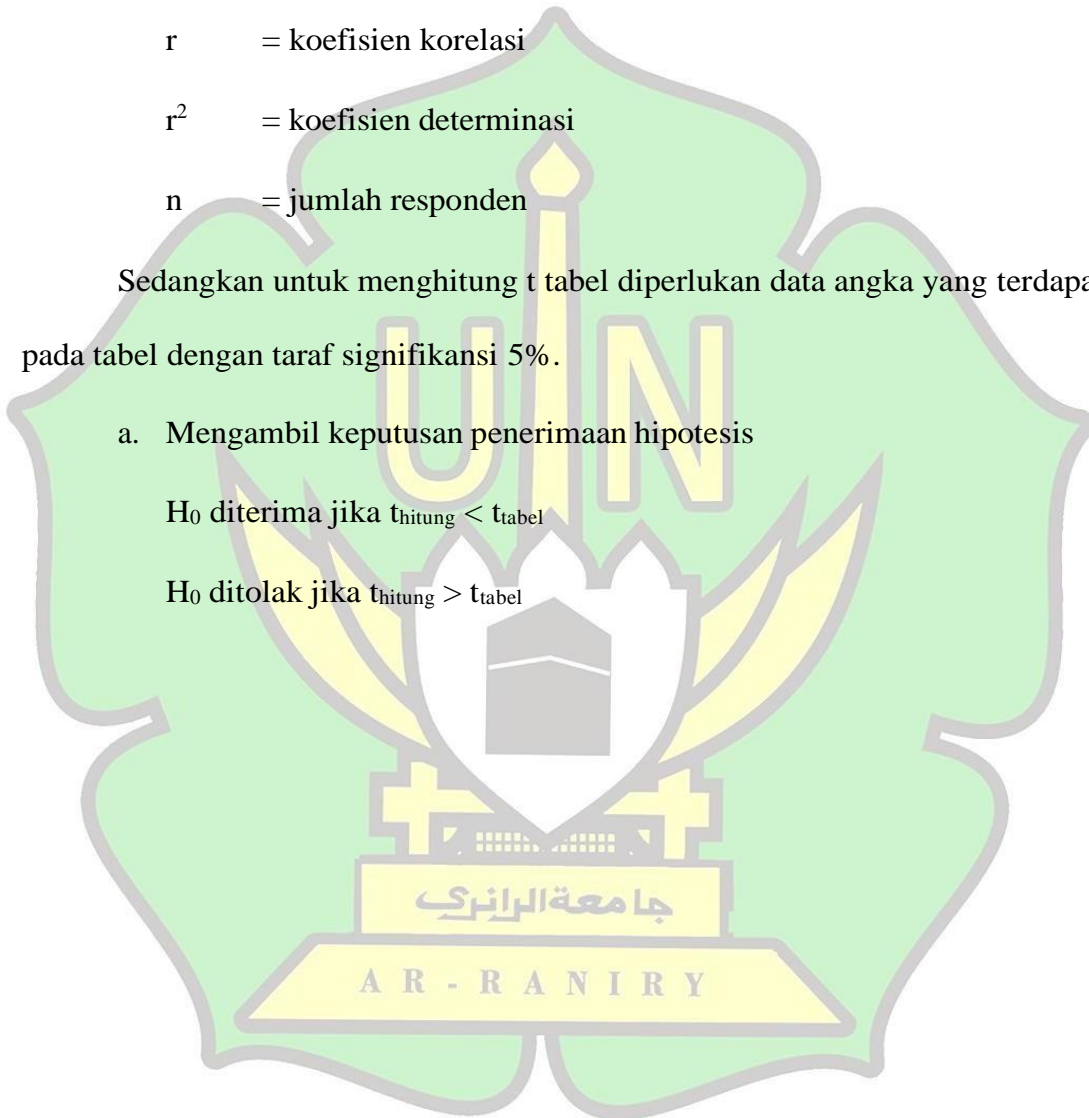
n = jumlah responden

Sedangkan untuk menghitung t tabel diperlukan data angka yang terdapat pada tabel dengan taraf signifikansi 5%.

a. Mengambil keputusan penerimaan hipotesis

H_0 diterima jika $t_{hitung} < t_{tabel}$

H_0 ditolak jika $t_{hitung} > t_{tabel}$



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum

4.1.1 Deskripsi Lokasi Penelitian

Peneliti akan menggunakan gambaran lokasi penelitian sebagai sumber penelitian studi analisis Gampong Pulo Naleung, Kecamatan Peusangan Kabupaten Bireuen, Provinsi Aceh. Untuk daerah pemilihan Gampong Pulo Naleung berada di daerah pemilihan II.

Gambar 4.1
Peta Pembagian Dapil



Sumber : Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bireuen

Kabupaten Bireuen dalam catatan sejarah dikenal sebagai daerah Jeumpa. Dahulu Jeumpa merupakan sebuah kerajaan kecil di Aceh. Menurut Ibrahim Abduh dalam Ikhtisar Radja Jeumpa, Kerajaan Jeumpa terletak di Desa Blang Seupeung, Kecamatan Jeumpa, Kabupaten Bireuen. Kerajaan-kerajaan kecil di Aceh tempo dulu termasuk Jeumpa mengalami pasang surut. Apalagi setelah kehadiran Portugis ke Malaka pada tahun 1511 M yang disusul dengan kedatangan Belanda. Secara de facto Belanda menguasai Aceh pada tahun 1904, yaitu ketika Belanda dapat menduduki benteng Kuta Glee di Batee Iliak, di bagian barat Kabupaten Bireuen.

Kemudian dengan Surat Keputusan *Vander Guevernement General Van Nederland Indie* tanggal 7 September 1934, wilayah Aceh dibagi menjadi 6 (enam) kabupaten (*Afdeeling*). Salah satunya adalah *Afdeeling Noord Kust Van Aceh* yang terbagi ke dalam 3 (tiga) *Onder Afdeeling* (wilayah), yaitu *Onder Afdeeling Bireuen* (sekarang Kabupaten Bireuen), *Onder Afdeeling Lhokseumawe* (sekarang Kota Lhokseumawe) dan *Onder Afdeeling Lhoksukon* (Lhoksukon, ibukota Aceh Utara sekarang). *Onder Afdeeling* ini di kontrol seorang kepala yang dikenal dengan nama *Countroleur* atau *Wedana*. Selain *Onder Afdeeling* tersebut, terdapat juga beberapa daerah Ulee Balang (*Zelf Bestuur*) yang dapat memerintah sendiri terhadap daerah dan rakyatnya, yaitu *Ulee Balang Keureutoe*, *Ulee Balang Geureugok*, *Ulee Balang Jeumpa* dan *Ulee Balang Peusangan* yang diketuai oleh *Ampon Chik*.

Pada masa pendudukan Jepang istilah *Afdeeling* diganti dengan *Bun*, *Onder Afdeeling* diganti dengan *Gun*, *Zelf Bestuur* disebut *Sun*. Sedangkan *mukim* disebut *Kun* dan *gampong* disebut *Kumi*. Setelah Indonesia merdeka pada tahun 1945, Aceh Utara

disebut *Luhak*, yang dikepalai oleh Kepala Luhak sampai tahun 1949. Kemudian, setelah

Belanda mengakui kedaulatan Indonesia melalui Konferensi Meja Bundar pada 27 Desember 1949, dibentuklah Negara Republik Indonesia Serikat (RIS) dengan beberapa negara bagian. Salah satunya adalah Negara Bagian Sumatera Timur, Aceh dan Sumatera Utara tergabung didalamnya dalam Provinsi Sumatera Utara. Kemudian melalui Undang-Undang Darurat nomor 7 tahun 1956 tentang pembentukan daerah otonom setingkat kabupaten di Provinsi Sumatera Utara, maka dibentuklah Daerah Tingkat II Aceh Utara.

Keberadaan Aceh dibawah Provinsi Sumatera Utara menimbulkan rasa tidak puas masyarakat Aceh. Para tokoh Aceh menuntut agar Aceh berdiri sendiri sebagai sebuah provinsi. Hal ini juga yang kemudian memicu terjadinya pemberontakan Darul Islam/Tentara Islam Indonesia (DI/TII) pada tahun 1953. Pemberontakan ini baru padam setelah keluarnya Keputusan Perdana Menteri Republik Indonesia Nomor 1/Missi/1957 tentang pembentukan Provinsi daerah Istimewa Aceh dan Aceh Utara sebagai salah satu daerah Tingkat dua, Bireuen masuk dalam wilayah Kabupaten Aceh Utara. Baru pada tahun 1999 Bireuen menjadi Kabupaten tersendiri setelah lepas dari Aceh Utara selaku Kabupaten induk, pada 12 Oktober 1999, melalui Undang Undang Nomor 48 tahun 1999.⁴²

Kabupaten Bireuen terbentuk pada tahun 1999 berdasarkan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999, yang kemudian dirubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000. Daerah kabupaten yang terletak diwilayah pesisir Provinsi Aceh ini sebelumnya

⁴² <https://www.bireuenkab.go.id/halaman/sejarah>

merupakan wilayah dari Kabupaten Aceh Utara, yang kemudian dimekarkan pada tahun 1999 melalui peraturan undang-undang tersebut.

Kabupaten Bireuen juga dikenal sebagai kota juang. Jika membuka kembali sejarah pada masa perjuangan kemerdekaan Indonesia, maka tidaklah terlalu berlebihan kalau Bireuen dijuluki sebagai kota juang. Berdasarkan cerita sejarah yang tidak tercatat,

Bireuen dikenal dengan julukan kota juang karena sejarahnya. Perjalanan sejarah membuktikan bahwa Bireuen adalah kota perjuangan dan pernah menjadi Ibukota Republik Indonesia ketiga ketika Yogyakarta dikuasai oleh Belanda pada tahun 1948. Walaupun sejarah ini tidak pernah tersurat dalam catatan sejarah kemerdekaan Indonesia.

Secara geografis, posisi Kabupaten Bireuen berada pada titik koordinat antara 40 54'-50 21' Lintang Utara (LU) dan 960 20'- 970 21' Bujur Timur (BT). Luas wilayah Kabupaten Bireuen adalah 1.796,31 kilometer persegi (km²) atau seluas 179.631 hektar (Ha), dan berada pada ketinggian 0 sampai 2.637 meter Dari Permukaan Laut (DPL). Luas wilayah Kabupaten Bireuen tersebut adalah sekitar 3,13 persen dari total luas wilayah Provinsi Aceh secara keseluruhan (57.365,57 km²).⁴³

4.1.2 Asal Usul Gampong Pulo Naleung

Nama Gampong Pulo Naleung terdiri dari dua kata yaitu Pulo (Pulau) dan Naleung (Rumput) atau Pulo Naleung (Pulau Rumput), menurut sejarah Gampong Pulo Naleung mempunyai 2 buah pulau yang luasnya sekitar 800 meter persegi yang posisinya berdekatan yang dikelilingi rawa-rawa dan ditengah Pulo tersebut banyak ditumbuhi semak belukar dan rumput, sehingga penduduk pada masa itu memberikan nama

⁴³ <https://www.bireuenkab.go.id/halaman/demografi>

Gampong menjadi PULO NALEUNG, dan seiring perubahan waktu dan silih berganti pemerintahan Gampong pada masa itu, penduduk merubah rawa-rawa sebagai tambak dan sawah, sejarah masih meninggalkan pulau tersebut yang sekarang berubah menjadi lahan perkebunan penduduk yang dikenal dengan nama COT BRUK, dan MATENG JROEK.

Sejak masa pemerintahan geuchik Tgk Muhammad Gampong Pulo Naleung dibagi menjadi kedalam 3 dusun, Dusun **H.Benteng**, Dusun Teungoh, Dusun **Panglima Kaom**, kedua nama geuchik pada masa penjajahan belanda dan jepang itu diabadikan sebagai nama Dusun sampai sekarang, luas gampong Pulo Naleueng sekarang mencapai 250 ha, dengan penduduk 1981 jiwa (tahun 2021).⁴⁴

4.1.3 Letak Geografis Gampong Pulo Naleung

Gampong Pulo Naleung merupakan Gampong yang terletak di daerah pesisir, dengan luas Gampong \pm 250 ha, adapun batas-batas Gampong Pulo Naleung sebagai berikut :

Utara	: Gampong Matamamplam
Selatan	: Gampong Cot Bada dan Nicah
Timur	: Gampong Cot Nga
Barat	: Gampong Kareung

⁴⁴ Kantor Kechik Gampong Pulo Naleung. Profil Gampong Pulo Naleung. hlm 6

Jumlah dusun yang ada di Gampong Pulo Naleung Kecamatan Peusangan Kabupaten Bireuen terdiri dari 3 tiga dusun yaitu : Dusun H.Banteng, Dusun Teungoh dan Dusun Panglima Kaom

4.1.4 Kondisi Fisik Dasar Gampong

Kondisi fisik dasar Gampong Pulo Naleung Kecamatan Peusangan Kabupaten Bireuen dengan luas ± 250 ha dalam pemandaatan lahan dibagi kedalam 2 kelompok:

1. Pemukiman : $\div 90$ ha
2. Tambak : $\div 65$ ha
3. Sawah : ± 75 ha
4. Lahan Nganggur : $\div 20$ ha

4.1.5 Kondisi Demokrafis Gampong

Jumlah penduduk Gampong Pulo Naleung berjumlah 1981 yang tersebar di dalam 3 dusun . Jarak gampong dengan pusat kecamatan

1. Jarak ke Ibu Kota Kecamatan : 5 km
2. Lama tempuh ke Ibu Kota Kecamatan : 10 menit
3. Jarak ke Ibu Kota Kabupaten : 9 km
4. Lama tempuh ke Ibu Kota Kecamatan : 25 menit

4.1.6 Kondisi Sosial Ekonomi Gampong

Gampong Pulo Naleung merupakan Gampong yang berada di daerah pesisir pantai, dengan mata pencaharian masyarakat tani tambak, tani sawah, walaupun ada beberapa masyarakat yang berkerja sebagai PNS, Jualan, tukang bangunan, buruh bangunan, dan banyak pemuda/pemudi yang mengadu nasib keluar kota dan negara

(Malaysia) untuk merubah nasib baik bekerja sebagai TKI (tenaga kerja Indonesia) tenaga resmi maupun bekerja illegal. Masyarakat juga masih sangat kental dengan budaya gotong royong baik dalam pembangunan gampong maupun dalam acara sosial lainnya.⁴⁵

4.2 Hasil Penelitian

4.2.1 Karakteristik Responden

Populasi yang dimaksudkan adalah masyarakat yang telah memilih di Gampong Pulo Naleung Kabupaten Bireuen pada Pemilihan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota tahun 2019 adalah 928 pemilih.⁴⁶ Berdasarkan pernyataan diatas jumlah populasi lebih dari 100, maka peneliti mengadakan penelitian dengan sampel yang di ambil 10% dari jumlah populasi 928 jiwa pada tahun 2019 yang telah menggunakan hak pilihnya pada pemilu legislatif tahun 2019.

Pada penelitian ini peneliti mengambil responden sebanyak 92,8 yang kemudian penulis bulatkan menjadi 93 orang yang kemudian dikelompokkan menurut Umur, Jenis Kelamin, Status Perkawinan, Pendidikan Terakhir dan Pekerjaan. Untuk memperjelas karakteristik responden yang dimaksud, maka akan disajikan tabel mengenai data responden. Berdasarkan hasil 93 eksemplar kuesioner yang telah disebar dan dijawab oleh responden maka didapatkan hasil karakteristik responden sebagai berikut:

⁴⁵ *Ibid*, hlm7

⁴⁶ Kantor Kip Kabupaten Bireuen.

4.2.1.1 Hasil Karakteristik Responden Berdasarkan Umur

Pada penelitian ini 93 orang yang dipilih sebagai responden terdiri dari usia yang beragam. Adapun persebaran responden berdasarkan umur ditunjukkan dalam Tabel 4.1 berikut ini :

Tabel 4.1
Identitas Responden Berdasarkan Umur

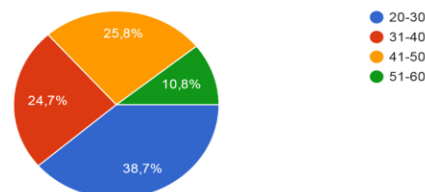
No.	Umur	Jawaban Responden	
		Frekuensi	Persen
1.	20-30	36	38,7
2.	31-40	23	24,7
3.	41-50	24	25,8
4.	51-60	10	10,8
Total		93	100,0

Sumber : Data Primer, 2021 (diolah)

Berdasarkan Tabel 4.1 di atas dapat dilihat bahwa responden yang berusia 20-30 tahun berjumlah sebanyak 36 yaitu sebesar 38,7%, usia 31-40 tahun berjumlah 23 orang atau 24,7%, usia 41-50 tahun berjumlah 24 atau 25,8% dan usia 51-60 tahun berjumlah 10 orang atau 10,8%. Dapat disimpulkan responden pada penelitian ini didominasi oleh responden berusia 20-30 tahun. Untuk melihat perbandingannya dapat dilihat pada Diagram 4.1 di bawah ini:

Diagram 4.1
Identitas Responden Berdasarkan Umur

UMUR
93 jawaban



4.2.1.2 Hasil Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Pada penelitian ini 93 orang yang dipilih sebagai responden terdiri dari pria dan wanita. Adapun persebaran responden berdasarkan jenis kelamin ditunjukkan dalam Tabel 4.2 berikut ini :

Tabel 4.2
Identitas Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

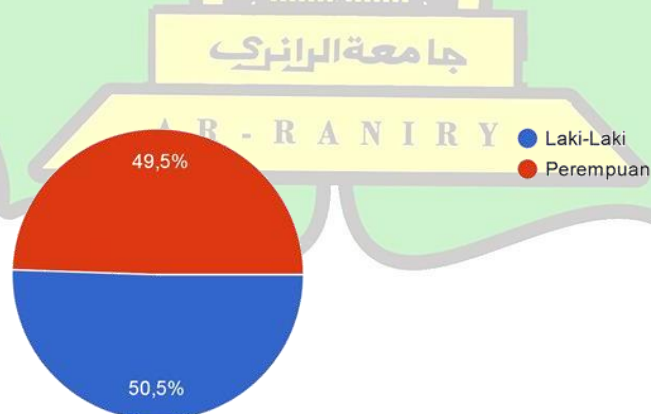
No.	Umur	Jawaban Responden	
		Frekuensi	Persen
1.	Laki-laki	47	50,5
2.	Perempuan	46	49,5
Total		93	100,0

Sumber : Data Primer, 2021 (diolah)

Berdasarkan Tabel 4.2 di atas dapat dilihat bahwa responden yang berjenis kelamin laki-laki terdapat sebanyak 47 orang atau 50,5% sedangkan responden yang berjenis kelamin perempuan sebanyak 46 orang atau 49,5%. Dapat disimpulkan responden pada penelitian ini didominasi oleh responden berjenis kelamin laki-laki. Untuk melihat perbandingannya dapat dilihat pada Diagram 4.2 di bawah ini:

Diagram 4.2
Identitas Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

JENIS KELAMIN
93 jawaban



4.2.1.3 Hasil Karakteristik Responden Berdasarkan Status Perkawinan

Pada penelitian ini 93 orang yang dipilih sebagai responden terdiri dari usia yang beragam. Adapun persebaran responden berdasarkan status perkawinan ditunjukkan dalam Tabel 4.3 berikut ini :

Tabel 4.3
Identitas Responden Berdasarkan Status Perkawinan

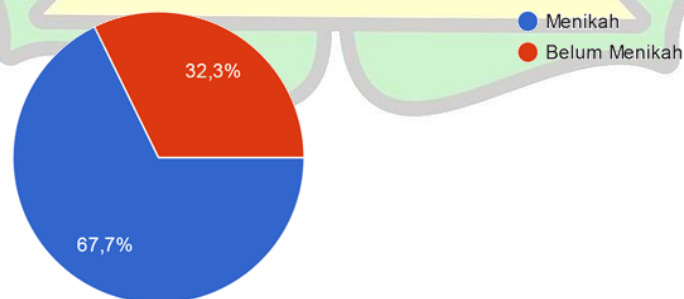
No.	Pekerjaan	Jawaban Responden	
		Frekuensi	Persen
1.	Menikah	63	67,7
2.	Belum Menikah	30	32,3
Total		93	100,0

Sumber : Data Primer, 2021 (diolah)

Berdasarkan Tabel 4.3 di atas dapat diketahui bahwa dari 93 orang responden yang sudah menikah yaitu sebanyak 63 orang atau 67,7%, dan sisanya 30 orang atau 32,3% belum menikah. Dapat disimpulkan responden pada penelitian ini didominasi oleh responden yang telah menikah. Untuk melihat perbandingannya dapat dilihat pada Diagram 4.3 di bawah ini:

Diagram 4.3
Identitas Responden Berdasarkan Status Perkawinan

STATUS PERKAWINAN
93 jawaban



4.2.1.4 Hasil Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan

Pendidikan merupakan salah satu jalan untuk menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas, semakin tingginya pendidikan seseorang secara otomatis juga akan mendorong sumber daya manusia yang jauh lebih baik dibandingkan dengan yang berpendidikan rendah. Dari penelitian 93 orang responden dengan klasifikasi berdasarkan Pendidikan dapat ditunjukkan pada Tabel 4.4 berikut ini:

Tabel 4.4
Identitas Responden Berdasarkan Pendidikan

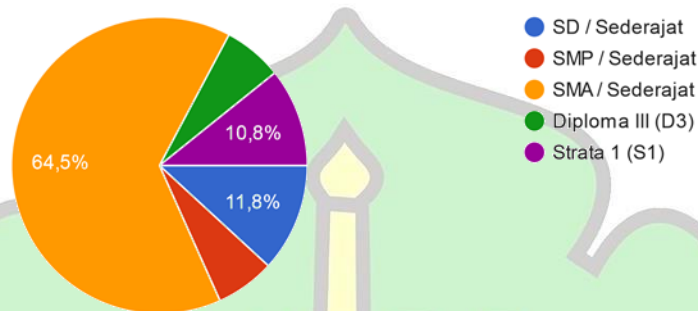
No.	Pendidikan	Jawaban Responden	
		Frekuensi	Persen
1.	SD/Sederajat	11	11,8
2.	SMP/Sederajat	6	6,5
3.	SMA/Sederajat	60	64,5
4.	D3	6	6,5
5.	S1	10	10,8
Total		93	100,0

Sumber : Data Primer, 2021 (diolah)

Berdasarkan Tabel 4.4 di atas dapat diketahui bahwa dari 93 orang responden yang berpendidikan SD/Sederajat sebanyak 11 orang atau 11,8%, SMP/Sederajat sebanyak 6 orang atau 6,5%, SMA/Sederajat sebanyak 60 orang atau 64,5%, Diploma 3 sebanyak 6 orang atau 6,5%, dan responden Sarjana sebanyak 10 orang atau 10,8%. Sehingga dapat disimpulkan bahwa responden pada penelitian ini didominasi oleh responden berpendidikan terakhir SMA. Untuk melihat perbandingannya dapat dilihat pada Diagram 4.4 di bawah ini:

Diagram 4.4 Identitas Responden Berdasarkan Pendidikan

PENDIDIKAN
93 jawaban



4.2.1.5 Hasil Karakteristik Responden Berdasarkan Pekerjaan

Dari penelitian 93 orang responden dengan klasifikasi berdasarkan Pekerjaan dapat ditunjukkan pada Tabel 4.5 berikut ini :

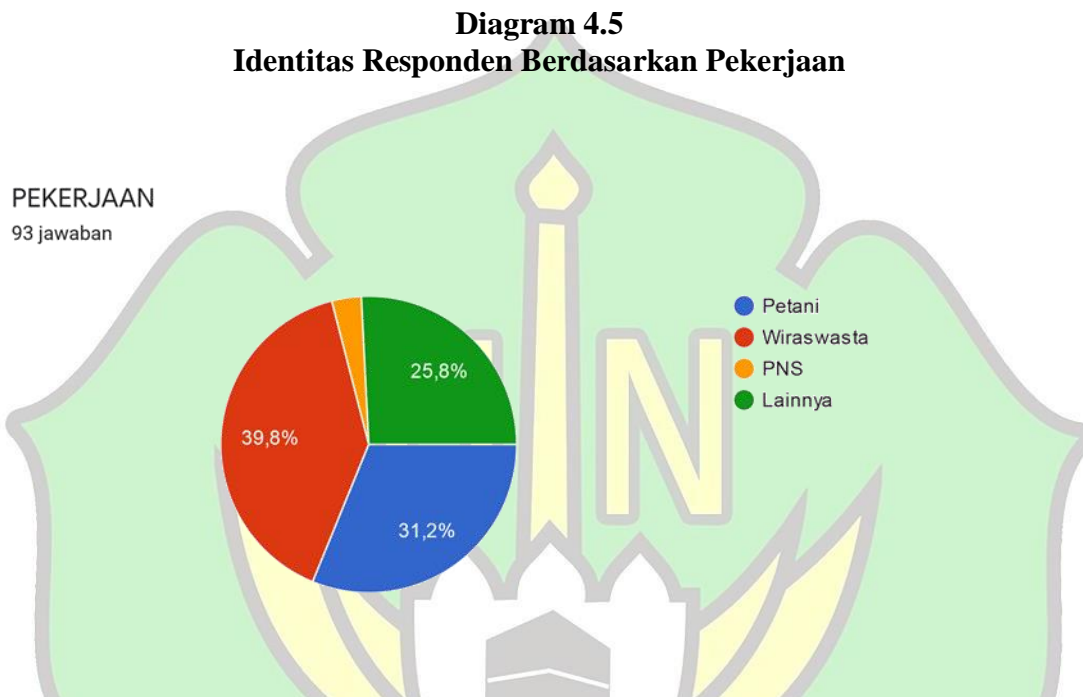
Tabel 4.5
Identitas Responden Berdasarkan Pekerjaan

No.	Pekerjaan	Jawaban Responden	
		Frekuensi	Persen
1.	Petani	29	31,2
2.	Wiraswasta	37	39,8
3.	PNS	3	3,2
4.	Lainnya	24	25,8
Total		93	100,0

Sumber : Data Primer, 2021 (diolah)

Berdasarkan Tabel 4.5 di atas dapat diketahui bahwa dari 100 orang responden yang bekerja sebagai Petani sebanyak 29 responden atau 31,2%, Wiraswasta sebanyak 37 responden atau 39,8%, PNS sebanyak 3 responden atau 3,2%, dan lainnya sebanyak 24 responden atau 25,8%. Dapat disimpulkan bahwa responden pada penelitian ini

didominasi oleh responden yang bekerja sebagai wiraswasta. Untuk melihat perbandingannya dapat dilihat pada Diagram 4.5 di bawah ini:



4.2.2 Analisis Partisipasi Politik Responden Terhadap Pemilihan Legislatif

Partisipasi politik dalam negara demokrasi merupakan indikator implementasi penyelenggaraan kekuasaan negara tertinggi yang absah oleh rakyat (kedaulatan rakyat), yang dimanifestasikan keterlibatan mereka dalam pesta demokrasi (Pemilu). Makin tinggi tingkat partisipasi politik mengindikasikan bahwa rakyat mengikuti dan memahami serta melibatkan diri dalam kegiatan kenegaraan begitupun sebaliknya.⁴⁷

Tingkat partisipasi politik pada pemilihan legislatif dilihat skor dari respon yang diberikan oleh responden penelitian. Hasil deskriptif didapat dari analisa dan interpretasi

⁴⁷ Primandha Sukma Nur Wardhani. Partisipasi Politik Pemilih Pemula dalam Pemilihan Umum. Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial. Vol 10(1) (2018):57-62.

dari data penelitian dengan angket yang disebar dari peneliti. berjumlah 10 poin pernyataan, dapat dilihat pada Tabel 4.6 mengenai partipasi politik responden pada pemilihan legislatif tahun 2019.

Tabel 4.6
Distribusi Responden Terhadap Pemilihan Legislatif Tahun 2019

Daftar Pertanyaan	SS	S	KS	TS	STS	Mean
Saya menggunakan hak pilih pada pemiihan legislatif tahun 2019 DPRK Bireuen.	13	55	17	6	2	3,76
Saya aktif dan pernah terlibat dalam organisasi sosial politik.	15	36	29	11	2	3,54
Selama masa pemilihan, baik sebelum kampanye, kampanye, menjelang hari pemilihan. Saya senantiasa aktif mencari dukungan dari berbagai pihak demi kemenangan dan perolehan suara salah satu calon yang saya dukung.	17	26	30	15	5	3,37
Saya pernah terlibat dalam kampanye salah satu kandidat calon legislatif tahun 2019.	13	54	18	6	2	3,75
Sehubungan dengan adanya tim sukses dari masing-masing calon saya ikut menjadi tim sukses salah satu calon dan aktif dalam semua kegiatan tim sukses tersebut.	16	36	27	10	4	3,53
Saya mengikuti pemilu tahun 2019 atas dasar kesadaran pribadi.	18	26	28	16	5	3,38
Saya mengikuti pemilihan secara langsung karena di arahkan atau mobilisasi oleh suatu parpol.	8	15	56	11	3	3,15
Dalam kampanye untuk mendapatkan suara sebanyak-banyaknya calon banyak memberikan visi-misi nya apabila terpilih nanti, saya dalam memilih salah satu calon, saya banyak dipengaruhi oleh visi-misi tersebut	13	47	21	8	4	3,61
Dalam pemilihan legislatif 2019, masing-masing kandidat yang ada saling menonjolkan sisi karisma dan figur masing-masing untuk medapatkan suara sebanyak-banyaknya, menurut saya sisi figur dan karisma cukup berperan membuat saya memilih salah satu calon tersebut	14	31	35	11	2	3,47
Pelaksanaan pemilihan tahun 2019 sudah dilaksanakan cukup baik dan sudah benar menampung aspirasi rakyat berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil	9	27	33	20	4	3,18
Rata-rata						3,47

Sumber : Data Primer, 2021 (diolah)

Berdasarkan Tabel 4.6 diatas dapat dilihat bahwa dari sepuluh item pertanyaan yang ada pada kuesioner untuk mengukur variabel pemilihan legislatif maka item pertanyaan “Saya menggunakan hak pilih pada pemilihan legislatif tahun 2019 DPRK Bireuen” memiliki nilai mean tertinggi yaitu sebesar 3,76 dan item pertanyaan “Saya mengikuti pemilihan secara langsung karena di arahkan atau mobilisasi oleh suatu parpol” memiliki nilai mean terendah yaitu sebesar 3,15 dan nilai mean variabel pemilihan legislatif untuk pemilihan umum tahun 2019 adalah sebesar 3,47.

4.2.3 Analisis Persepsi Responden Terhadap *Money Politic*

Melihat pada perkembangan politik pada saat ini, sebagian besar masyarakat sarat dengan praktek *Money politik* baik pada saat pemilihan kepala desa, legislatif hingga presiden. Dikemas dalam berbagai bentuk seperti pemberian hadiah, pembagian sembako, uang transport dan sebagainya. karena sudah melekatnya dengan masyarakat seakan akan tidak ada ruang untuk memberantasnya. Masyarakat mengetahui bahwa pemberian uang tersebut tidak dilakukan tidak cuma-cuma, melainkan ada tuntutan untuk memilih calon tersebut pada proses pemilihan. Hal tersebut membuktikan bahwa masyarakat tahu namun tidak dapat menolaknya karena alasan uang tersebut merupakan salah satu rezeki tambahan demi memenuhi kebutuhan ekonomi keluarganya⁴⁸ Untuk analisis mengenai persepsi *Money politik* Pada Pileg tahun 2019 dikabupaten Bireuen dapat diketahui dari skor respon yang diberikan oleh responden penelitian. Hasil deskriptif didapat dari analisa dan interpretasi dari data penelitian dengan angket yang

⁴⁸ Jurnal “Gema Kampus” Edisi Vol.13 No.1 Tahun 2018. Persepsi Masyarakat Ter-hadap politik uang (*Money Politik*) Dalam Setiap Pesta Demokrasi Di Kampung Soryar Distrik Biak Timur Kabupaten Biak Numfor.

disebar dari peneliti yang berjumlah 8 poin pernyataan, hal ini dapat dilihat pada Tabel 4.7 mengenai *money politic* terhadap pemilu 2019 di Kota Bireuen khususnya di Gampong Pulo Naleung.

Tabel 4.7
Persepsi Responden Terhadap *Money Politic* Pemilihan Umum Tahun 2019

Daftar Pertanyaan	SS	S	KS	TS	STS	Mean
Saya mengetahui bahwa <i>Money politic</i> adalah bentuk pelanggaran dalam pemilu.	11	52	16	9	5	3,59
Strategi <i>Money Politic</i> sangat berpengaruh untuk kemenangan suatu calon anggota legislatif tahun 2019.	21	60	8	3	1	4,04
Saya mau ikut berpartisipasi memenangkan salah satu calon legislative tahun 2019 jika saya mendapatkan sejumlah uang, sembako, hadiah, dan sejenisnya.	16	46	27	4	0	3,79
Saya pernah menerima uang dari calon kandidat pada saat menjelang hari pemilu 2019.	13	55	17	6	2	3,76
Yang menyebabkan saya menerima uang dari calon kandidat maupun timses karena kondisi ekonomi yang sulit.	15	36	29	11	2	3,54
Uang yang saya terima dari calon kandidat maupun timses dapat dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.	17	26	30	15	5	3,37
Ketika saya diberikan sejumlah uang/sembako/atau hadiah lainnya dari calon kadidat. Saya akan menerima uang nya lalu memilih calon tersebut	26	38	22	5	2	3,87
Setiap praktik <i>Money Politic</i> (Politik Uang) harus dilaporkan kepada Pengawas Pemilu (Panwaslih)	18	42	25	6	2	3,73
Rata-rata						3,71

Sumber: Data Primer, 2021 (Diolah)

Berdasarkan Tabel 4.7 di atas dapat dilihat bahwa dari delapan item pertanyaan yang ada pada kuesioner untuk mengukur variabel *Money Politic* maka item pertanyaan “Strategi *Money Politic* sangat berpengaruh untuk kemenangan suatu calon anggota legislatif tahun 2019.” memiliki nilai mean tertinggi yaitu sebesar 4,04 dan item pertanyaan “Uang yang saya terima dari calon kandidat dapat dipergunakan untuk

memenuhi kebutuhan sehari-hari” memiliki nilai mean terendah yaitu sebesar 3,37 dan nilai mean variabel *Money politic* untuk pemilihan umum tahun 2019 adalah sebesar 3,71.

4.3 Hasil Pengujian Instrumen

4.3.1 Uji Validitas

Pengujian validitas yang digunakan dalam penelitian ini adalah pengujian validitas item. Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui apakah item-item pertanyaan yang dimuat dalam kuesioner penelitian termasuk valid atau tidak. Suatu instrumen yang valid atau sah mempunyai nilai validitas yang tinggi, sebaliknya instrumen yang tidak valid berarti memiliki validitas yang rendah. Pengujian validitas data dalam penelitian ini dilakukan secara statistik, yaitu dengan menggunakan uji *Pearson product-moment coefficient of correlation*.

Pengujian validitas kuesioner didasarkan pada perbandingan nilai r_{hitung} dan nilai r_{tabel} . Nilai r_{hitung} diperoleh dengan melihat nilai korelasi antara skor alternatif pilihan jawaban responden pada item pertanyaan tertentu dengan total skor item dalam variabel terkait. Selanjutnya nilai korelasi hitung (r_{hitung}) tersebut dibandingkan dengan nilai kritis *r product moment* (r_{tabel}), dengan ketentuan apabila nilai $r_{hitung} > r_{tabel}$, maka item pertanyaan dalam variabel tertentu dinyatakan valid. Sebaliknya apabila nilai $r_{hitung} < r_{tabel}$, maka item pernyataan dalam variabel tertentu dinyatakan tidak valid. Tabel 4.8 berikut ini menyajikan hasil pengujian validitas kuesioner didasarkan pada perbandingan nilai r_{hitung} dan nilai r_{tabel} dari variabel independen dan dependen:

Tabel 4.8
Hasil Uji Validitas

Variabel	No. Item	Nilai r_{hitung}	Nilai r_{tabel}	Keterangan
Pemilihan Legislatif (Y)	A1	0,771	0,2039	Valid
	A2	0,873	0,2039	Valid
	A3	0,795	0,2039	Valid
	A4	0,764	0,2039	Valid
	A5	0,845	0,2039	Valid
	A6	0,779	0,2039	Valid
	A7	0,260	0,2039	Valid
	A8	0,688	0,2039	Valid
	A9	0,836	0,2039	Valid
	A10	0,673	0,2039	Valid
Money Politic (X)	B1	0,649	0,2039	Valid
	B2	0,331	0,2039	Valid
	B3	0,632	0,2039	Valid
	B4	0,801	0,2039	Valid
	B5	0,775	0,2039	Valid
	B6	0,642	0,2039	Valid
	B7	0,583	0,2039	Valid
	B8	0,544	0,2039	Valid

Sumber : Data Primer, 2021 (diolah)

Sebagaimana yang disajikan pada Tabel 4.8, menunjukkan bahwa seluruh variabel yaitu *Money Politik* dan *Pemilihan Legislatif* menunjukkan nilai korelasi $r_{hitung} > r_{tabel}$. Dengan demikian, dapat disimpulkan setiap item pertanyaan untuk semua variabel dinyatakan valid karena nilai korelasi butir pernyataan dalam kuesioner memiliki nilai $r_{hitung} > 0,2039$. Sehingga dapat disimpulkan bahwa seluruh item pertanyaan pada variabel dalam penelitian ini valid dan layak dianalisis lebih lanjut.

4.3.2 Uji Reliabilitas

Untuk menilai kehandalan kuesioner yang digunakan, maka dalam penelitian ini digunakan uji reliabilitas berdasarkan *Cronbach Alpha*. Analisis ini bertujuan untuk melihat korelasi antara skala yang dibuat dengan skala variabel yang ada. Penggunaan

item-item pertanyaan sebagai indikator dari data variabel penelitian mewajibkan adanya suatu pengujian konsistensi menggunakan uji reliabilitas, sehingga data yang digunakan tersebut efektif dan dapat dipercaya atau memenuhi aspek kehandalan untuk dianalisis lebih lanjut.

Ukuran reliabilitas dianggap handal berdasarkan pada koefisien *Cronbach alpha* apabila nilainya lebih dari 0,60. Jika derajat kehandalan data lebih besar dari koefisien *Cronbach alpha* (α), maka hasil pengukuran dapat dipertimbangkan sebagai alat ukur dengan tingkat ketelitian dan konsistensi pemikiran yang baik. Hasil uji reliabilitas dapat dilihat pada Tabel 4.9 berikut:

Tabel 4.9
Hasil Uji Reliabilitas

	Variabel	Cronbach's Alpha	Keterangan
X	<i>Money Politic</i>	0,773	Handal
Y	Pemilihan Legislatif	0,903	Handal

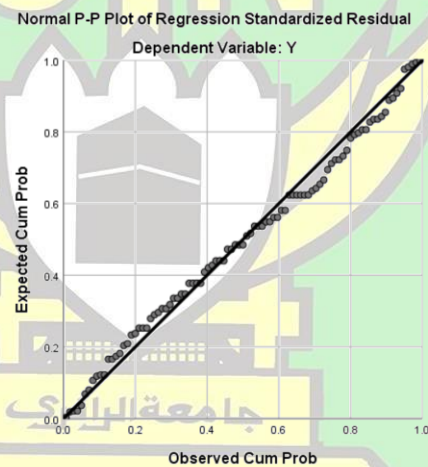
Sumber : Data Primer, 2021 (diolah)

Tabel 4.9 di atas menunjukkan bahwa hasil uji reliabilitas data untuk semua item pernyataan *Money Politic* sebesar 0,773 sedangkan Pemilihan Legislatif memiliki nilai cronbach's alpha sebesar 0,903. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa setiap item pernyataan untuk semua variabel sudah handal, karena nilai *Cronbach's Alpha* setiap variable lebih dari 0,60 hal ini juga menunjukkan bahwa seluruh variabel dalam penelitian ini layak untuk dianalisis lebih lanjut.

4.4 Hasil Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel terikat dan variabel bebas keduanya mempunyai distribusi normal atau tidak. Model data yang baik adalah berdistribusi normal atau mendekati normal. Untuk menguji apakah distribusi data normal atau tidak, maka dapat dilakukan analisis grafik atau dengan memperhatikan *normal probability plot* pada *scatter plot* berdistribusi normal. Jika distribusi data adalah normal, maka garis yang menggambarkan data sesungguhnya akan mengikuti garis diagonalnya. Berikut ini merupakan uji normalitas dengan analisis grafik histogram dan P-Plot.

Grafik 4.1
Grafik Hasil Uji Normalitas (P-Plot)



Grafik4.1 merupakan hasil uji normalitas dengan menggunakan grafik P-Plot dapat disimpulkan bahwa semua data yang ada berdistribusi normal, karena semua data mendekati pola garis lurus diagonal, maka data tersebut memenuhi asumsi normal atau mengikuti garis normalitas, maka data yang telah dikumpulkan dapat dilanjutkan ke tahapan selanjutnya.

Selain dengan melihat grafik P-Plot, normalitas data juga dapat dilihat dengan uji statistik menggunakan uji statistik non-parametrik menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov. Hasil Uji Kolmogorov-Smirnov dapat dilihat pada Tabel 4.10 berikut

Tabel 4.10
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual (2014)
N		93
Normal Parameter ^{a,b}	Mean	0,0000
	Std. Deviation	0,3635
Most Extreme Differences	Absolute	0,066
	Positive	0,066
	Negative	-0,049
Kolmogorov-Smirnov Z		0,066
Asymp. Sig. (2-tailed)		0,200

Sumber: Data Primer, 2021 (Diolah)

Suatu data akan terdistribusi dengan normal berdasarkan uji *Kolmogorov-Smirnov* apabila nilai signifikansi $> 0,05$ sedangkan bila nilai signifikansi $< 0,05$ berarti distribusi data tidak normal. Tabel 4.10 menunjukkan bahwa nilai p-value sebesar $0,200 > 0,05$ yang artinya data pada penelitian ini telah terdistribusi secara normal dan bisa untuk dianalisis lebih lanjut.

4.5 Hasil Uji Linieritas

Secara umum uji linearitas untuk mengetahui apakah dua variable mempunyai hubungan yang linier secara signifikan atau tidak. Data yang baik seharusnya terdapat hubungan yang linear antara variabel independen dengan variabel dependen. Uji linearitas merupakan syarat sebelum dilakukannya uji regresi linier. Suatu uji yang dilakukan harus berpedoman pada dasar pengambilan keputusan dalam uji linearitas yaitu

jika nilai signifikansi lebih besar dari 0.05, maka kesimpulannya adalah terdapat hubungan linier antara variabel independen dengan variabel dependen sebaliknya, jika nilai signifikansi lebih kecil dari 0.05, maka kesimpulannya adalah tidak terdapat hubungan linier antara variabel independen dengan variabel dependen. Hasil uji linieritas dapat dilihat pada Tabel 4.11 berikut:

Tabel 4.11
Hasil Uji Linieritas

	F	Sig.
Linearity	271,663	0,000
Deviation From Linearity	1,101	0,370

Sumber : Data Primer, 2021 (diolah)

Tabel 4.11 menunjukkan bahwa nilai signifikansi linearity adalah sebesar 0,000. Hal ini menunjukkan bahwa variabel pemilihan legislatif dan *Money* politik memiliki hubungan yang linier karena $0,000 < 0,050$. Maka penelitian ini dapat dilanjutkan kedalam tahapan proses lebih lanjut.

4.6 Hasil Analisis Regresi Linier Sederhana

Untuk melihat besarnya pengaruh variabel *Money politic* terhadap pemilihan legislatif secara keseluruhan maka akan diuji berdasarkan uji ANOVA. Berikut ini adalah hasil uji F yang dilakukan untuk mengetahui pengaruh secara simultan variabel bebas terhadap variabel terikat.

Tabel 4.12
Hasil Uji Simultan (ANOVA)

Model	F	Sig
Regression	266,642	0,000

Sumber : Data Primer, 2021 (diolah)

Berdasarkan Tabel 4.12, dapat diketahui bahwa nilai F hitung sebesar 266,642, dengan tingkat signifikansi *p-value* sebesar $0,000 < 0,05$ sedangkan F_{tabel} 3,947. Hasil uji F memperlihatkan $F_{hitung} > F_{tabel}$ ($266,642 > 3,947$). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa *money politic* mempengaruhi pemilihan legislatif secara signifikan.

Hasil analisis regresi linier sederhana variabel *Money politic* terhadap pemilihan legislatif tahun 2019 dapat dilihat pada Tabel 4.13 dibawah ini:

Tabel 4.13
Hasil Analisis Regresi Linier Sederhana

Variabel	<i>Unstandardized Coefficient (Beta)</i>	T	Sig.
<i>Constant</i>	-0,543	-2,180	0,032
<i>Money Politik (X)</i>	1,082	16,329	0,000

Sumber : Data primer, tahun 2021 (diolah)

Berdasarkan Tabel 4.13 maka didapatkan persamaan sebagai berikut:

$$Y = -0,543 + 1,082 X + e$$

Berdasarkan Tabel 4.13 diatas nilai signifikansi variabel *Money politic* yaitu $0,000 < 0,05$ hal ini menunjukkan variabel *Money politic* memiliki pengaruh yang kuat terhadap variabel terikat yaitu pemilihan legislatif. Berdasarkan nilai beta variabel *Money Politic* sebesar 1,082 menunjukkan *Money Politck* memiliki pengaruh positif terhadap pemilihan legislatif hal ini juga berarti apabila *Money Politic* meningkat sebesar 1 maka kecendrungan masyarakat untuk memilih di pemilihan legislatif akan meningkat sebesar 1,082 kali. Nilai t hitung juga menunjukkan t hitung $>$ t tabel yaitu $16,329 > 1,986$ hal ini menunjukkan H_0 ditolak dan H_1 diterima, berarti terdapat pengaruh yang signifikan dari

variabel *Money Politic* terhadap variabel pemilihan legislatif tahun 2019 di Kota Bireun khususnya pada Gampong Pulo Naleung.

4.7 Pembahasan

Penelitian ini menggunakan analisis regresi linier sederhana dengan variabel *money politic* sebagai variabel independen dan variabel pemilihan legislatif sebagai variabel dependen. Berdasarkan 93 eksemplar kuesioner yang disebar didapatkan bahwa nilai signifikansi *money politic* terhadap pemilihan legislatif di Gampong Pulo Naleung tahun 2019 sebesar 0,000 menunjukkan *money politic* memiliki pengaruh yang kuat terhadap pemilihan legislatif karena nilai signifikansi $< 0,05$.

Bila dilihat dari nilai beta variabel *Money Politic* sebesar 1,082 menunjukkan *Money Politic* memiliki pengaruh positif terhadap pemilihan legislatif hal ini juga berarti apabila *Money Politic* meningkat sebesar 1 maka kecenderungan masyarakat untuk memilih di pemilihan legislatif akan meningkat sebesar 1,082 kali. Nilai t hitung juga menunjukkan $t \text{ hitung} > t \text{ tabel}$ yaitu $16,329 > 1,986$ hal ini menunjukkan H_0 ditolak dan H_1 diterima, berarti terdapat pengaruh yang signifikan dari variabel *Money Politic* terhadap variabel pemilihan legislatif tahun 2019 pada Gampong Pulo Naleung.

Politik Uang menjadi strategi paling ampuh solusi bagi para calon kandidat untuk menarik simpati masyarakat yang merasa kurang diperhatikan oleh pemegang kekuasaan sebelumnya, karena biasanya *money politic* kerap dilakukan pada lapisan masyarakat dengan ekonomi rendah. Transaksi *money politic* tersebut dilakukan dengan sangat sederhana, di mana setiap dari masyarakat yang telah menerima uang tersebut harus

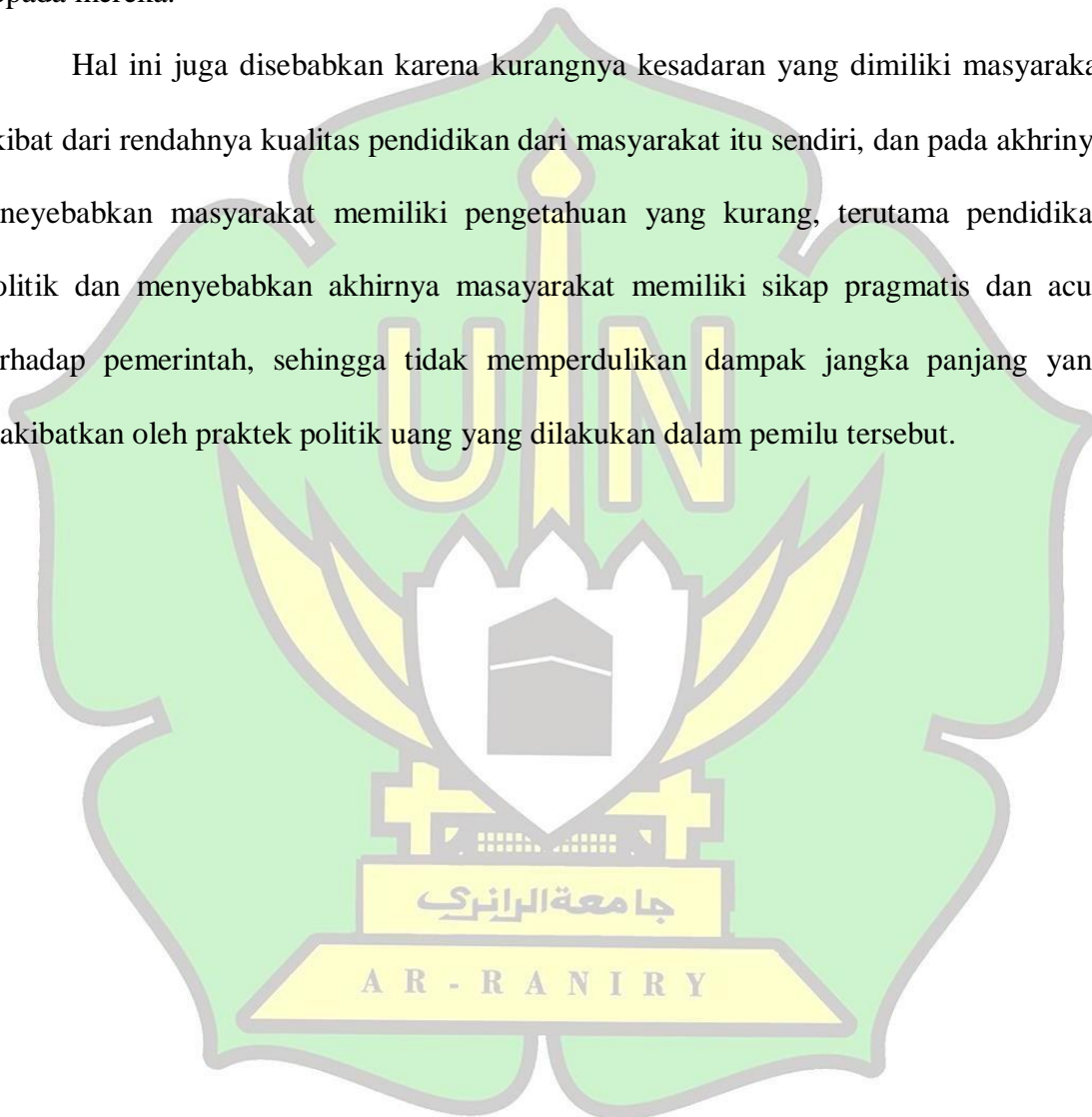
memilih yang memberikan keuntungan. Masyarakat yang apatis beranggapan bahwa pemberian tersebut tampak nyata dibandingkan harus menunggu perhatian pemerintah yang masyarakat Rasa belum pasti, sehingga dengan kondisi demikian dimanfaatkan oleh calon kandidat untuk menarik simpati masyarakat. Di sisi lain masyarakat hanya mementingkan manfaat saat itu saja tanpa menimbang-nimbang lagi manfaat jangka panjang atas pilihannya tersebut. Dapat disimpulkan bahwa tradisi *money politic* ini merupakan kesepakatan antara kedua belah pihak, karena keduanya merasa diuntungkan pada saat itu. Sehingga perlu adanya badan pengawas yang mengambil langkah tegas agar tindakan kecurangan pada saat pemilihan umum dapat diminimalisir yang akan berujung pada hasil pemilu yang jujur serta adanya keadilan bagi kandidat lainnya.

Beberapa alasan mengapa *money politic* kerap dilakukan diantaranya adanya Persoalan ekonomi, kurangnya pemahaman politik, kebiasaan pada saat tahun pemilu, dan juga kesepakatan kerja yang dibangun antara calon kandidat dengan masyarakat sehingga masyarakat terpengaruh untuk menerima *money politic* tersebut, sekaligus menerima pemberian dalam bentuk apapun. Akibat dari menerima uang tersebut masyarakat merasa wajib untuk mengikuti pemilihan dan menggunakan hak pilihnya dikarenakan adanya kesepakatan tidak tertulis antara masyarakat dan calon tersebut.

Money politic erat kaitannya dengan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Masyarakat yang merasa tidak diperhatikan akibat dari pemerataan ekonomi yang tidak merata menimbulkan rasa apatis yang berujung pada rendahnya minat masyarakat untuk berpartisipasi dalam kegiatan politik atas dasar keinginan diri sendiri. Hadirnya calon kandidat yang seolah peduli dengan nasib masyarakat mendorong

masyarakat untuk memilih mereka sebagai orang yang dipercaya untuk memegang kekuasaan. Padahal dalam praktiknya banyak calon kandidat yang setelah terpilih terkesan melupakan janji mereka bahkan mematahkan harapan masyarakat tersebut kepada mereka.

Hal ini juga disebabkan karena kurangnya kesadaran yang dimiliki masyarakat akibat dari rendahnya kualitas pendidikan dari masyarakat itu sendiri, dan pada akhirnya menyebabkan masyarakat memiliki pengetahuan yang kurang, terutama pendidikan politik dan menyebabkan akhirnya masyarakat memiliki sikap pragmatis dan acuh terhadap pemerintah, sehingga tidak memperdulikan dampak jangka panjang yang diakibatkan oleh praktek politik uang yang dilakukan dalam pemilu tersebut.



BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai signifikansi *money* politik terhadap pemilihan legislatif di Gampong Pulo Naleung tahun 2019 sebesar 0,000. Hal ini berarti *money* politik memiliki pengaruh kuat terhadap pemilihan legislatif karena nilai signifikansi $< 0,05$. Selanjutnya, bila dilihat dari nilai beta variabel *Money* Politik sebesar 1,082 hal ini menunjukkan *Money* Politik memiliki pengaruh positif terhadap pemilihan legislatif hal ini juga berarti apabila *Money* Politik meningkat sebesar 1 maka kecenderungan masyarakat untuk memilih di pemilihan legislatif akan meningkat sebesar 1,082 kali. Nilai *t* hitung juga menunjukkan *t* hitung $>$ *t* tabel yaitu $16,329 > 1,986$ hal ini menunjukkan H_0 ditolak dan H_1 diterima, berarti terdapat pengaruh yang signifikan dari variabel *Money Politic* terhadap variabel pemilihan legislatif tahun 2019 pada Gampong Pulo Naleung. Dengan demikian hal ini menunjukkan bahwa dari tahun ketahun tindakan *money politic* tetap berlangsung disetiap pemilu meskipun itu merupakan bentuk kecurangan, karena dianggap saling menguntungkan di mana masyarakat yang mengalami kesulitan ekonomi akan merasa terbantu dan calon kandidat mendapatkan hak suara masyarakat.

Pengaruh *Money Politic* terhadap partisipasi masyarakat pada pemilu memberikan pengaruh yang sangat signifikan, Faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya *Money Potilic* karena masalah ekonomi, kebiasaan ketika pemilu, pendidikan politik yang rendah, kepercayaan terhadap pemerintah dan kesepakatan kerja yang dijalin antara

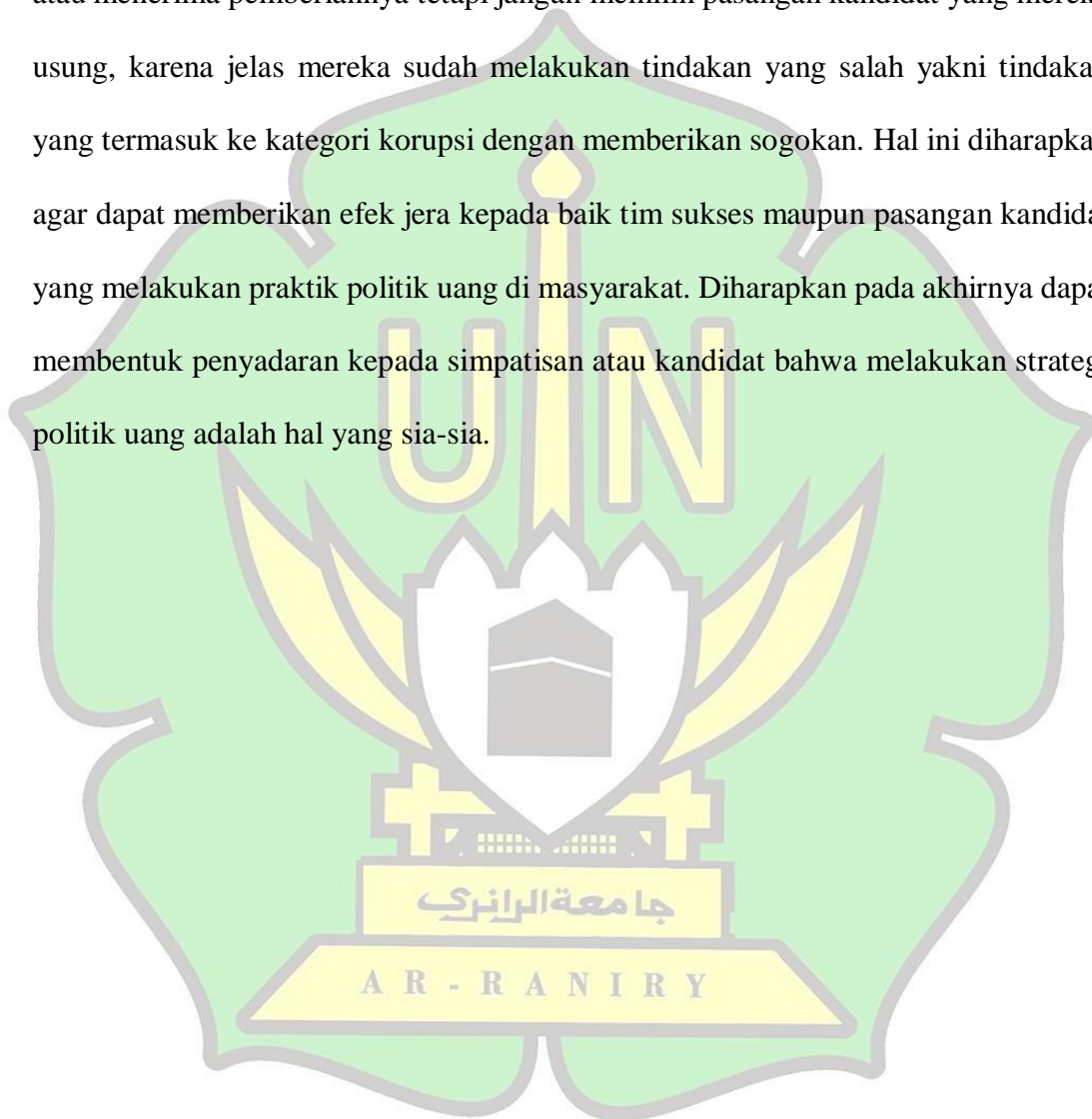
pemilih sehingga masyarakat cenderung terbuka dan menerima kegiatan *Money Potilic* yang dilakukan oleh calon kandidat dan menerima segala macam bentuk pemberian. Pemberian uang yang membuat masyarakat merasa wajib untuk mengikuti proses pemilu karena adanya bentuk kesepakatan tidak tertulis dengan unsur-unsur paksaan dari para pelaku *Money Potilik*.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan uraian diatas, maka saran untuk penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Perlu dilakukan pendidikan politik secara terus menerus terutama sebelum pemilu di dalam masyarakat tentang akibat atau dampak negatif dari *Money Politic*, kegiatan ini dimulai dengan sosialisasi yang dilakukan para tim sukses masing-masing kandidat atau bisa juga melalui kader-kader partai politik dan diawasi dengan badan pemilu setempat mengenai bahaya *Money Politic*. Hal ini dilakukan untuk membentuk pandangan masyarakat bahwa *Money Politic* memiliki dampak-dampak yang merugikan dalam jangka panjang apabila salah dalam menentukan pilihan calon pemimpin. Perlu juga menekankan kepada pemilih agar lebih mengutamakan memilih berdasarkan rekam jejak pemimpin yang akan dipilihnya. Selain itu diharapkan dapat mengontrol tindakan timses kandidat maupun kader-kader partai politik agar bersama-sama berjuang secara adil.
2. Pemikiran calon kandidat dimana *money politic* sebenarnya tidak terlalu menjamin kepastian akan jumlah suara yang yang didapat sesuai dengan dana yang telah

dikeluarkan dan perlunya adanya aturan yang jelas dan tegas untuk diberlakukan kepada masyarakat melalui pendekatan secara personal apabila masih ada oknum simpatisan atau tim sukses yang melakukan politik uang untuk menolak pemberian atau menerima pemberiannya tetapi jangan memilih pasangan kandidat yang mereka usung, karena jelas mereka sudah melakukan tindakan yang salah yakni tindakan yang termasuk ke kategori korupsi dengan memberikan sogokan. Hal ini diharapkan agar dapat memberikan efek jera kepada baik tim sukses maupun pasangan kandidat yang melakukan praktik politik uang di masyarakat. Diharapkan pada akhirnya dapat membentuk penyadaran kepada simpatisan atau kandidat bahwa melakukan strategi politik uang adalah hal yang sia-sia.



DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Agus Riwanto, Hukum Partai Politik dan Hukum Pemilu di Indonesia, Yogyakarta: Thafa Media, 2016.
- Amrullah Ahmad, dkk, Dimensi Hukum Islam Dalam System Hukum Nasional (Jakarta: Gema Insan Press, 1999).
- Arikunto, Suharsimi. 2006. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik. Jakarta:Rineka Cipta.
- Bambang Prasetyo.2013. Metode Penelitian Kuantitatif Teori dan Aplikasinya .Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Creswell, John W. 2012. Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Ismawan, Indra. 1999.Money Politics Pengaruh Uang Dalam Pemilu, Yogyakarta: Media Presindo
- Ibrahim Z. Fahmy Badoh Abdullah Dahlan, Korupsi Pemilu di Indonesia, (Jakarta Selatan: Indonesia Corruption Watch,2010).
- Jalaluddin Rakhmat.Psikologi Komunikasi.Bandung: Remaja Rosdakarya.2007.
- LeoAgustino, Pilkada dan Dinamika Politik Lokal (Yogyakarta: Pustaka Pelajar,2009).
- Miftah Thoha.Perilaku Organisasi: Konsep Dasar dan Aplikasinya.Jakarta: Raja Grafindo Persada.2010.
- Nasution. Metode Research (Penelitian Ilmiah). (Jakarta: Bumi Aksara, 2006).
- Saifuddin, Azwar. Metode Penelitian. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007).

Sutrisman, D. (2018). Pendidikan Politik, Persepsi, Kepemimpinan, Dan Mahasiswa. Bogor: Guepedia Publiser

Stephen, Robbins (2015), Perilaku Organisasi, Penerbit Salemba Empat, Jakarta.

Sanapiah Faisal.Format-Format Penelitian Sosial.Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2007.

Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2011.

Topo Santoso, Tindak Pidana Pemilu,(Jakarta: Sinar Grafika, 2006).

JURNAL TERKAIT

Eliska Pratiwi, I Nyoman Sujana dan Iyus Akhmad Haris, “Persepsi dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Penerapan Program Kerja BUMDES Dwi Amertha Sari di Desa Jinengdalem”, Jurnal Pendidikan Ekonomi Undiksha, Vol. 11 No.1/ 2019, 286

Ebin Danius, Politik Uang dan Uang Rakyat, Universitas Halmahera, 1999,

Hadi Suprpto Arifin, Ikhsan Fuady, Engkus Kuswarno. Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Persepsi Mahasiswa Unirta Terhadap Keberadaan Perda Syariah Di Kota Serang Jurnal Penelitian Komunikasi dan Opini Publik Vol. 21 No.1, Juli: 88-101

Handayani, T.I (2014). Tinjauan Yuridis Kampanye Pemilihan Umum Kepala Daerah Dalam Penggunaan Media Televisi sebagai Media Kampanye. Universitas Hasanuddin.

Hamdan Zoelva, 2014, Instrumen Hukum dan Penindakan Money Politic. Disampaikan pada Seminar Nasional Instrumen Hukum Pencegahan Dan Penindakan Praktik Ilegal Dalam Pemilu 2014 Hanns Seidel Foundation (Hsf) Indonesia- Pusat Studi Hukum Konstitusi (Pshk) Fakultas Hukum UniversitasIslam Indonesia

Indah Sri Utami, Pencegahan Politik Uang dan Penyelenggaraan Pilkada yang Berkualitas: Sebuah Revitalisasi Ideologi, Seminar Nasional Hukum, Vol. 2 No. 1 2016.

- Jurnal “Gema Kampus” Edisi Vol.13 No.1 Tahun 2018. Persepsi Masyarakat Terhadap politik uang (Money Politic) Dalam Setiap Pesta Demokrasi Di Kampung Soryar Distrik Biak Timur Kabupaten Biak Numfor.
- Lina Ulfa Fitriani, L Wiresapta Karyadi, Dwi Setiawan Chaniago. Fenomena Politik Uang (Money Politic) Pada Pemilihan Calon Anggota Legislatif di Desa Sandik Kecamatan Batu Layar Kabupaten Lombok Barat. RESIPROKAL Vol. 1, No. 1, (53-61) Juni 2019
- Lukas Norman Kbarek. Pengaruh Money Politik Dalam Menentukan Kualitas Pemilu di Indonesia. Vol 1 No 1 (2019) SEMINAR NASIONAL I HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN Singaraja, 5 Oktober 2019.
- M. Abdul Kholiq, Perspektif Hukum Pidana tentang Fenomena Money Politic dan Korupsi Politik dalam Pemilu, 2014, makalah disampaikan dalam Seminar Nasional Mewujudkan Pemilu yang Demokratis, Forum Kajian dan Penulisan Hukum (FKPH) Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta Tanggal 22 Maret 2014.
- Nisa Nabila, Paramita Prananingtyas, Muhamad Azhar. Pengaruh Money Politik Dalam Pemilihan Anggota Legislatif Terhadap Keberlangsungan Demokrasi Di Indonesia. NOTARIUS, Volume 13 Nomor 1 (2020)
- Persepsi masyarakat terhadap politik uang pada pilkada serentak. La ode suprianto. Neo societal; Vol.2:No.1.
- Primandha Sukma Nur Wardhani. Partisipasi Politik Pemilih Pemula dalam Pemilihan Umum. Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial. Vol 10(1) (2018):57-62.
- Wayan Febrianto, Ida Ayu Putu Widiati, Luh Putu Suryan. “Analisis Penanganan Politik Uang Ditinjau Dari Undang-Undang Pilkada”. Jurnal Interpretasi Hukum Edisi Vol. 1 No.2 –September 2020.
- Roger,S.(2010), Representasi kepentingan rakyat pada pemilihan legislatif 201, Salatiga: Pustaka Pelajar.
- Rivai, Veithzal dan Deddy Mulyadi. (2003). Kepemimpinan dan Perilaku Organisasi.Jakarta: Raja Grafindo Persada.

INTERNET

Didik Supriyanto, Koordinator Pengawasan Panwas Pemilu, [Http://Www.Panwaslu Jum'at](http://www.panwaslu.jum'at).

Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, Edisi Kedua, 1994), 965.

[Https://www.bireuenkab.go.id/](https://www.bireuenkab.go.id/)

[Https://aceh.tribunnews.com /amp/2019/04/02/ politik- uang- jelang- pemilu bagaimana menangkapnya](https://aceh.tribunnews.com/amp/2019/04/02/politik-uang-jelang-pemilu-bagaimana-menangkapnya). Diakses pada tanggal 21 Agustus 2020 pada pukul 22.00 WIB.

Kantor Keuhik Gampong Pulo Naleung

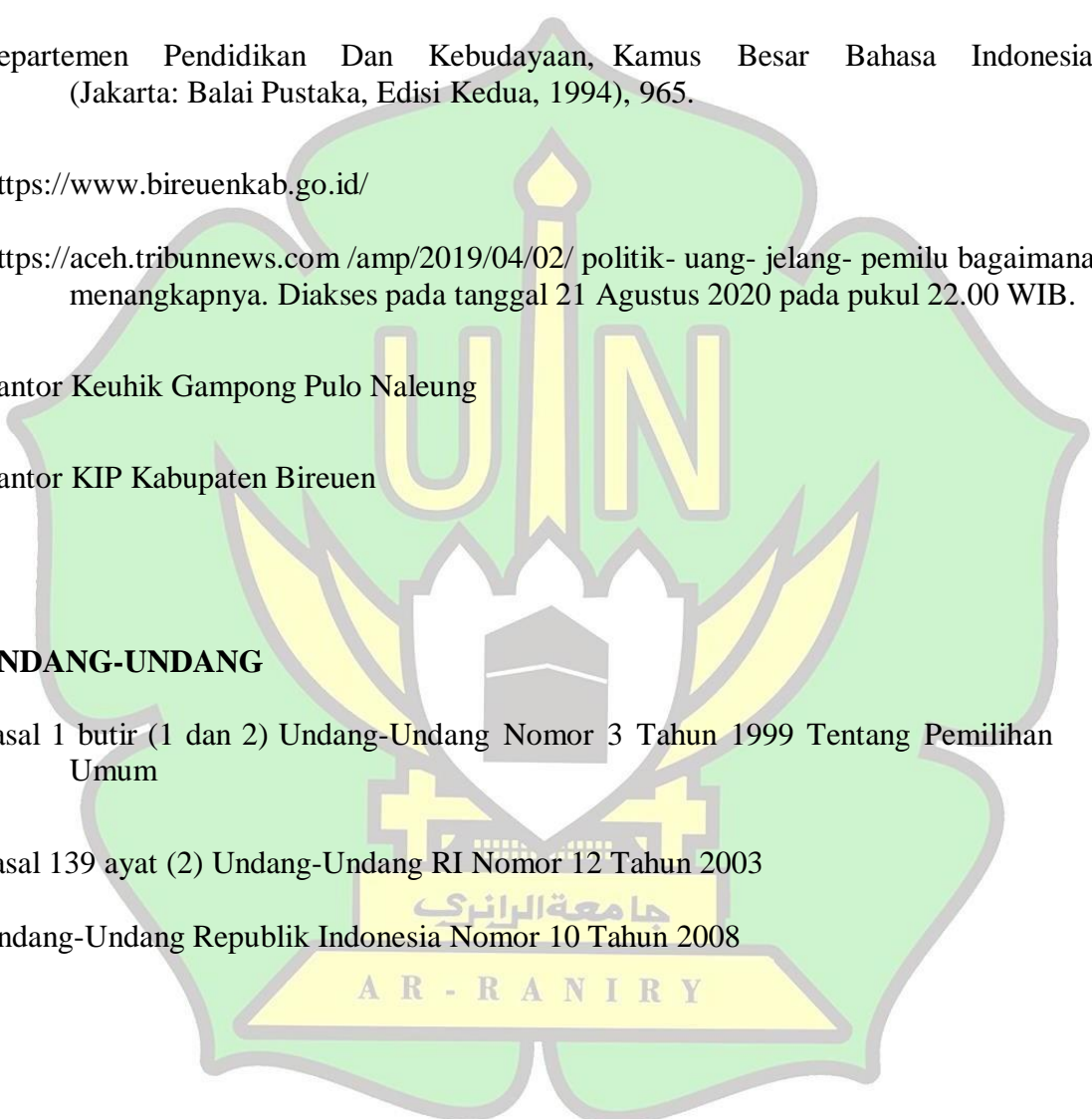
Kantor KIP Kabupaten Bireuen

UNDANG-UNDANG

Pasal 1 butir (1 dan 2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999 Tentang Pemilihan Umum

Pasal 139 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2003

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2008



LAMPIRAN

Umur

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	20-30	36	38.7	38.7	38.7
	31-40	23	24.7	24.7	63.4
	41-50	24	25.8	25.8	89.2
	51-60	10	10.8	10.8	100.0
Total		93	100.0	100.0	

JenisKelamin

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Laki-laki	47	50.5	50.5	50.5
	Perempuan	46	49.5	49.5	100.0
Total		93	100.0	100.0	

StatusPerkawinan

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Menikah	63	67.7	67.7	67.7
	Belum Menikah	30	32.3	32.3	100.0
Total		93	100.0	100.0	

Pendidikan

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	SD/Sederajat	11	11.8	11.8	11.8
	SMP/Sederajat	6	6.5	6.5	18.3
	SMA/Sederajat	60	64.5	64.5	82.8
	D3	6	6.5	6.5	89.2
	S1	10	10.8	10.8	100.0
	Total		93	100.0	100.0

Pekerjaan

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Petani	29	31.2	31.2	31.2
	Wiraswasta	37	39.8	39.8	71.0
	PNS	3	3.2	3.2	74.2
	Lainnya	24	25.8	25.8	100.0
	Total	93	100.0	100.0	

A1

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	STS	2	2.2	2.2	2.2
	TS	6	6.5	6.5	8.6
	KS	17	18.3	18.3	26.9
	S	55	59.1	59.1	86.0
	SS	13	14.0	14.0	100.0
	Total	93	100.0	100.0	

A2

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	STS	2	2.2	2.2	2.2
	TS	11	11.8	11.8	14.0
	KS	29	31.2	31.2	45.2
	S	36	38.7	38.7	83.9
	SS	15	16.1	16.1	100.0
	Total	93	100.0	100.0	

A3

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	STS	5	5.4	5.4	5.4
	TS	15	16.1	16.1	21.5
	KS	30	32.3	32.3	53.8
	S	26	28.0	28.0	81.7
	SS	17	18.3	18.3	100.0
	Total	93	100.0	100.0	

A4

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	STS	2	2.2	2.2	2.2
	TS	6	6.5	6.5	8.6
	KS	18	19.4	19.4	28.0
	S	54	58.1	58.1	86.0
	SS	13	14.0	14.0	100.0
Total		93	100.0	100.0	

A5

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	STS	4	4.3	4.3	4.3
	TS	10	10.8	10.8	15.1
	KS	27	29.0	29.0	44.1
	S	36	38.7	38.7	82.8
	SS	16	17.2	17.2	100.0
Total		93	100.0	100.0	

A6

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	STS	5	5.4	5.4	5.4
	TS	16	17.2	17.2	22.6
	KS	28	30.1	30.1	52.7
	S	26	28.0	28.0	80.6
	SS	18	19.4	19.4	100.0
Total		93	100.0	100.0	

A7

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	STS	3	3.2	3.2	3.2
	TS	11	11.8	11.8	15.1
	KS	56	60.2	60.2	75.3
	S	15	16.1	16.1	91.4
	SS	8	8.6	8.6	100.0
Total		93	100.0	100.0	

A8

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	STS	4	4.3	4.3	4.3
	TS	8	8.6	8.6	12.9
	KS	21	22.6	22.6	35.5
	S	47	50.5	50.5	86.0
	SS	13	14.0	14.0	100.0
Total		93	100.0	100.0	

A9

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	STS	2	2.2	2.2	2.2
	TS	11	11.8	11.8	14.0
	KS	35	37.6	37.6	51.6
	S	31	33.3	33.3	84.9
	SS	14	15.1	15.1	100.0
Total		93	100.0	100.0	

A10

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	STS	4	4.3	4.3	4.3
	TS	20	21.5	21.5	25.8
	KS	33	35.5	35.5	61.3
	S	27	29.0	29.0	90.3
	SS	9	9.7	9.7	100.0
	Total	93	100.0	100.0	

B1

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	STS	5	5.4	5.4	5.4
	TS	9	9.7	9.7	15.1
	KS	16	17.2	17.2	32.3
	S	52	55.9	55.9	88.2
	SS	11	11.8	11.8	100.0
	Total	93	100.0	100.0	

B2

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	STS	1	1.1	1.1	1.1
	TS	3	3.2	3.2	4.3
	KS	8	8.6	8.6	12.9
	S	60	64.5	64.5	77.4
	SS	21	22.6	22.6	100.0
	Total	93	100.0	100.0	

B3

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	TS	4	4.3	4.3	4.3
	KS	27	29.0	29.0	33.3
	S	46	49.5	49.5	82.8
	SS	16	17.2	17.2	100.0
	Total	93	100.0	100.0	

B4

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	STS	2	2.2	2.2	2.2
	TS	6	6.5	6.5	8.6
	KS	17	18.3	18.3	26.9
	S	55	59.1	59.1	86.0
	SS	13	14.0	14.0	100.0
	Total	93	100.0	100.0	

B5

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	STS	2	2.2	2.2	2.2
	TS	11	11.8	11.8	14.0
	KS	29	31.2	31.2	45.2
	S	36	38.7	38.7	83.9
	SS	15	16.1	16.1	100.0
	Total	93	100.0	100.0	

B6

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	STS	5	5.4	5.4	5.4
	TS	15	16.1	16.1	21.5
	KS	30	32.3	32.3	53.8
	S	26	28.0	28.0	81.7
	SS	17	18.3	18.3	100.0
	Total	93	100.0	100.0	

B7

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	STS	2	2.2	2.2	2.2
	TS	5	5.4	5.4	7.5
	KS	22	23.7	23.7	31.2
	S	38	40.9	40.9	72.0
	SS	26	28.0	28.0	100.0
	Total	93	100.0	100.0	

B8

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	STS	2	2.2	2.2	2.2
	TS	6	6.5	6.5	8.6
	KS	25	26.9	26.9	35.5
	S	42	45.2	45.2	80.6
	SS	18	19.4	19.4	100.0
	Total	93	100.0	100.0	

Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Y	93	1.00	4.80	3.4785	.72064
X	93	2.13	5.00	3.7171	.57509
Valid N (listwise)	93				

Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
A1	93	1.00	5.00	3.7634	.85208
A2	93	1.00	5.00	3.5484	.97263
A3	93	1.00	5.00	3.3763	1.12205
A4	93	1.00	5.00	3.7527	.85537
A5	93	1.00	5.00	3.5376	1.03797
A6	93	1.00	5.00	3.3871	1.14239
A7	93	1.00	5.00	3.1505	.85905
A8	93	1.00	5.00	3.6129	.97838
A9	93	1.00	5.00	3.4731	.96224
A10	93	1.00	5.00	3.1828	1.02094
B1	93	1.00	5.00	3.5914	1.00257
B2	93	1.00	5.00	4.0430	.73594
B3	93	2.00	5.00	3.7957	.77402
B4	93	1.00	5.00	3.7634	.85208
B5	93	1.00	5.00	3.5484	.97263
B6	93	1.00	5.00	3.3763	1.12205
B7	93	1.00	5.00	3.8710	.95810
B8	93	1.00	5.00	3.7312	.92242
Valid N (listwise)	93				

Uji Validitas



Correlations

		A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10	Y
A1	Pearson Correlation	1	.657**	.390**	.933**	.625**	.374**	.123	.828**	.562**	.288**	.771**
	Sig. (2-tailed)		.000	.000	.000	.000	.000	.239	.000	.000	.005	.000
	N	93	93	93	93	93	93	93	93	93	93	93
A2	Pearson Correlation	.657**	1	.616**	.622**	.846**	.531**	.147	.534**	.939**	.489**	.873**
	Sig. (2-tailed)	.000		.000	.000	.000	.000	.159	.000	.000	.000	.000
	N	93	93	93	93	93	93	93	93	93	93	93
A3	Pearson Correlation	.390**	.616**	1	.370**	.534**	.937**	.087	.322**	.629**	.727**	.795**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000		.000	.000	.000	.406	.002	.000	.000	.000
	N	93	93	93	93	93	93	93	93	93	93	93
A4	Pearson Correlation	.933**	.622**	.370**	1	.666**	.410**	.170	.768**	.527**	.264	.764**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000		.000	.000	.104	.000	.000	.011	.000
	N	93	93	93	93	93	93	93	93	93	93	93
A5	Pearson Correlation	.625**	.846**	.534**	.666**	1	.629**	.164	.507**	.787**	.409**	.845**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000		.000	.116	.000	.000	.000	.000
	N	93	93	93	93	93	93	93	93	93	93	93
A6	Pearson Correlation	.374**	.531**	.937**	.410**	.629**	1	.084	.311**	.544**	.666**	.779**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000		.424	.002	.000	.000	.000
	N	93	93	93	93	93	93	93	93	93	93	93
A7	Pearson Correlation	.123	.147	.087	.170	.164	.084	1	.096	.123	.043	.260
	Sig. (2-tailed)	.239	.159	.406	.104	.116	.424		.360	.239	.685	.012
	N	93	93	93	93	93	93	93	93	93	93	93
A8	Pearson Correlation	.828**	.534**	.322**	.768**	.507**	.311**	.096	1	.439**	.344**	.688**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.002	.000	.000	.002	.360		.000	.001	.000
	N	93	93	93	93	93	93	93	93	93	93	93
A9	Pearson Correlation	.562**	.939**	.629**	.527**	.787**	.544**	.123	.439**	1	.531**	.836**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.239	.000		.000	.000
	N	93	93	93	93	93	93	93	93	93	93	93
A10	Pearson Correlation	.288**	.489**	.727**	.264	.409**	.666**	.043	.344**	.531**	1	.673**
	Sig. (2-tailed)	.005	.000	.000	.011	.000	.000	.685	.001	.000		.000
	N	93	93	93	93	93	93	93	93	93	93	93
Y	Pearson Correlation	.771**	.873**	.795**	.764**	.845**	.779**	.260	.688**	.836**	.673**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.012	.000	.000	.000	
	N	93	93	93	93	93	93	93	93	93	93	93

** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

* Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).



Correlations

		B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	B8	X
B1	Pearson Correlation	1	.112	.283**	.738**	.422**	.215*	.239*	.186	.649**
	Sig. (2-tailed)		.283	.006	.000	.000	.038	.021	.075	.000
	N	93	93	93	93	93	93	93	93	93
B2	Pearson Correlation	.112	1	.359**	.103	-.018	.033	-.023	.337**	.331**
	Sig. (2-tailed)	.283		.000	.326	.863	.755	.828	.001	.001
	N	93	93	93	93	93	93	93	93	93
B3	Pearson Correlation	.283**	.359**	1	.321**	.295**	.165	.052	.851**	.632**
	Sig. (2-tailed)	.006	.000		.002	.004	.115	.621	.000	.000
	N	93	93	93	93	93	93	93	93	93
B4	Pearson Correlation	.738**	.103	.321**	1	.657**	.390**	.442**	.292**	.801**
	Sig. (2-tailed)	.000	.326	.002		.000	.000	.000	.005	.000
	N	93	93	93	93	93	93	93	93	93
B5	Pearson Correlation	.422**	-.018	.295**	.657**	1	.616**	.520**	.227*	.775**
	Sig. (2-tailed)	.000	.863	.004	.000		.000	.000	.029	.000
	N	93	93	93	93	93	93	93	93	93
B6	Pearson Correlation	.215*	.033	.165	.390**	.616**	1	.531**	.025	.642**
	Sig. (2-tailed)	.038	.755	.115	.000	.000		.000	.810	.000
	N	93	93	93	93	93	93	93	93	93
B7	Pearson Correlation	.239*	-.023	.052	.442**	.520**	.531**	1	-.015	.583**
	Sig. (2-tailed)	.021	.828	.621	.000	.000	.000		.886	.000
	N	93	93	93	93	93	93	93	93	93
B8	Pearson Correlation	.186	.337**	.851**	.292**	.227*	.025	-.015	1	.544**
	Sig. (2-tailed)	.075	.001	.000	.005	.029	.810	.886		.000
	N	93	93	93	93	93	93	93	93	93
X	Pearson Correlation	.649**	.331**	.632**	.801**	.775**	.642**	.583**	.544**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.001	.000	.000	.000	.000	.000	.000	
	N	93	93	93	93	93	93	93	93	93

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

Uji Reliabilitas

Reliability Statistics		Reliability Statistics	
Cronbach's Alpha	N of Items	Cronbach's Alpha	N of Items
.903	10	.773	8

Regresi linier sederhana

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.863 ^a	.746	.743	.36550

a. Predictors: (Constant), X

b. Dependent Variable: Y

ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	35.620	1	35.620	266.642	.000 ^b
	Residual	12.157	91	.134		
	Total	47.777	92			

a. Dependent Variable: Y

b. Predictors: (Constant), X

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-.543	.249		-2.180	.032
	X	1.082	.066	.863	16.329	.000

a. Dependent Variable: Y

Uji Linieritas

ANOVA Table

			Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Y * X	Between Groups	(Combined)	38.074	18	2.115	16.132	.000
		Linearity	35.620	1	35.620	271.663	.000
		Deviation from Linearity	2.454	17	.144	1.101	.370
	Within Groups		9.703	74	.131		
	Total		47.777	92			

Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		93
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	.36350616
Most Extreme Differences	Absolute	.066
	Positive	.066
	Negative	-.049
Test Statistic		.066
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 ^{c,d}

- a. Test distribution is Normal.
- b. Calculated from data.
- c. Lilliefors Significance Correction.
- d. This is a lower bound of the true significance.

Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual
Dependent Variable: Y

